



2025

# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

**TIM PENYUSUN LPK 2025  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

 [www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id)  
 (0751) 7054806  
 [admin@pta-padang.go.id](mailto:admin@pta-padang.go.id)



@ptapadanggoid



PengadilanTinggiAgamaPadang



PengadilanTinggiAgamaPadang



[www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id)

2

0

2

5

# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

---

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**



@ptapadanggoid



PengadilanTinggiAgamaPadang



PengadilanTinggiAgamaPadang



www.pta-padang.go.id

# Sekapur Sirih

## KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG



**“Integritas adalah fondasi  
peradilan. Tanpanya, hukum  
kehilangan makna dan keadilan  
kehilangan arah.”**

**(Nur Khazim)**



# Kata Pengantar



Bismillahirrahmaanirrahiim,  
Assalamualaikum Wr Wb.  
Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, program, dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Padang selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai wujud komitmen institusi dalam mewujudkan tata kelola peradilan yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16516/SEK/OT1.6/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025, yang mengamanatkan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan ketentuan tersebut, laporan ini memuat gambaran pelaksanaan kegiatan di bidang teknis yudisial, pembinaan dan pengawasan, serta dukungan manajemen yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Pengadilan Tinggi Agama Padang juga terus berupaya untuk mengedepankan transparansi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dapat diakses melalui *official website* PTA Padang [www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id).

Dengan penuh rasa syukur kami sampaikan capaian-capaian yang telah diperoleh PTA Padang dan PA se-Sumatera Barat sepanjang tahun 2025, yang merupakan hasil dari kerja keras dan kerja cerdas kita bersama dalam upaya menghadapi berbagai kondisi dan tantangan melalui optimalisasi peradilan modern berkelanjutan.

Khusus kepada Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 PTA Padang, kami ucapkan terima kasih atas kerja sama dan kerja kerasnya sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dapat tersusun dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua.

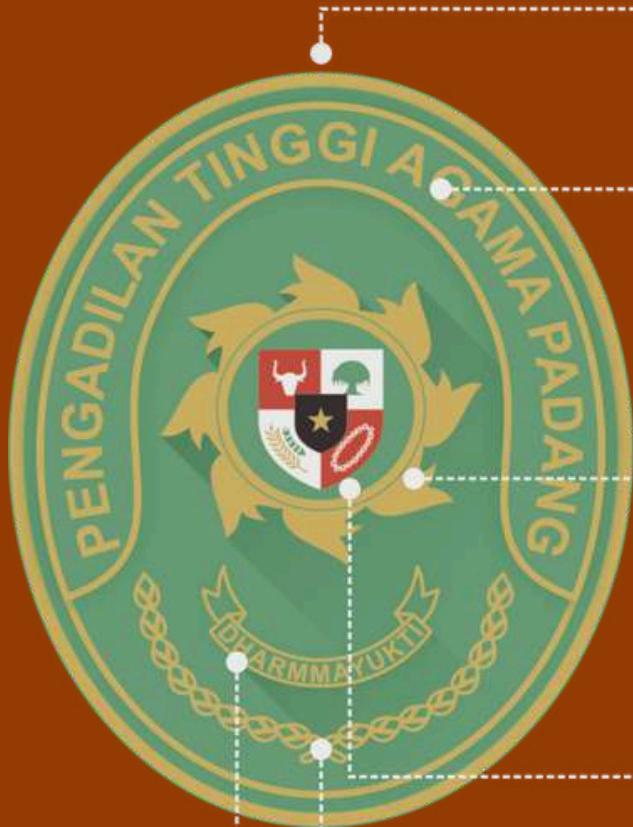
Padang, 30 Januari 2025

Ketua  
Pengadilan Tinggi Agama Padang

Drs. Nur Khazim, M.H.  
NIP. 19608031991031002



# MAKNA LAMBANG PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG



## Bentuk

Perisai bulat telur.

## Tulisan

Tulisan "Pengadilan Tinggi Agama Padang" yang melingkar di atas sebatas garis lengkung bagian atas menunjukkan Instansi pengguna lambang tersebut.

## Lukisan Cakra

Dalam cerita wayang (pewayangan), cakra adalah senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata "pamungkas" (terakhir). Cakra digunakan untuk memberantas ketidak adilan.

## Perisai Pancasila

Perisai Pancasila terletak di tengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidak adilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari pasal 1 UU Nomor 14 tahun 1970 yang rumusannya "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

## Untaian Bunga Melati

Terdapat 2 (dua) untaian bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah 8 (delapan) sifat keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrat).

## Seloka "Dharmmayukti"

Kata "DHARMMA" mengandung arti BAGUS, UTAMA, KEBAIKAN. Sedangkan kata "YUKTI" mengandung arti SESUNGGUHNYA, NYATA. Jadi kata "DHARMMAYUKTI" mengandung arti KEBAIKAN/KEUTAMAAN YANG NYATA/YANG SESUNGGUHNYA yakni yang berujud sebagai KEJUJURAN, KEBENARAN DAN KEADILAN.



**Drs. Nur Khazim, M.H.  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang**

Lahir di Semarang, 03 Agustus 1960, dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang sejak tanggal 3 September 2025 di ruang Kusumah Atmadja, Mahkamah Agung, Jakarta menggantikan Dr. Abd. Hakim, M.H.I yang mutasi ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu (12 September 2024) - Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara (30 November 2022) - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang (23 Agustus 2022) - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya (24 Januari 2022) - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang (23 Juli 2021) - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (27 November 2018) - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Banten (24 November 2014) - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin (09 November 2011) - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Manado (01 Agustus 2008) - Ketua Pengadilan Agama Kupang (26 November 2005) - Ketua Pengadilan Agama Waikabubak (11 Mei 2002) - Wakil Ketua Pengadilan Agama Waikabubak (19 Agustus 1997) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Waikabubak (29 Desember 1993) - Staf Pengadilan Agama Waikabubak (01 Oktober 1992) - Staf Pengadilan Agama Waikabubak (01 Maret 1991)



**Drs. H. Alaidin, M.H**

**Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang**

Lahir di Aceh Besar, 09 September 1969 dilantik sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang sejak tanggal 2 Oktober 2024 di Aula H. Mansur Dt. Nagari Basa, Padang. Beliau menggantikan Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A. yang mutasi ke Pengadilan Tinggi Agama Medan. Beliau meraih sarjana Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh Tahun 1993. melanjutkan S-2 Ilmu Hukum Islam Universitas Islam Jakarta Tahun 2014. Beberapa jabatan yang pernah diampu antara lain, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (03 September 2024), Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan (19 Juni 2023), Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh (29 Agustus 2022), Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh (08 Juli 2021), Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung (14 Agustus 2020), Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (10 Februari 2020), dan pernah menjadi Hakim Yustisial Pengadilan Agama Jakarta Pusat (10 Agustus 2010).

# KILAS BALIK

## 2025

### Penandatanganan Pakta Integitas 2 Januari 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang dan seluruh Aparatur melaksanakan kegiatan penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2025 di Command Center PTA Padang.



### Silaturrahim dengan Gubernur Sumbar 3 Januari 2025

Mengawali Tahun 2025, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang didampingi Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris dan Kabag. Umum dan Keuangan berkunjung dalam rangka silaturahmi ke Istana Gubernur Sumatera Barat. Kedatangan rombongan PTA Padang disambut baik oleh Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah, S.P. beserta jajaran.

### Benchmarking Bersama KPK RI 24 Januari 2025

Kegiatan benchmarking bersama KPK RI dilaksanakan secara virtual di Ruang Command Center PTA Padang dan dihadiri oleh seluruh Aparatur PTA Padang serta Pimpinan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat beserta jajarannya, dengan narasumber dari KPK RI yang diwakili oleh Bapak Kunto Ariawan selaku Kepala Satuan Tugas Direktorat Monitoring Deputi Pencegahan KPK RI, mengusung tema "Identifikasi Risiko Korupsi di Pengadilan dan Pencegahannya"



### Benchmarking Bersama PTA Medan 24 Januari 2025

PTA Padang melaksanakan kegiatan benchmarking secara virtual bersama dengan PTA Medan terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

## Penandatanganan Komitmen Bersama 3 Februari 2025

Penandatanganan Komitmen Bersama Keberlanjutan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025



## PTA Padang Laksanakan Pemusnahan Arsip 10 Februari 2025



Pengadilan Tinggi Agama Padang melaksanakan Pemusnahan Arsip Tahun 2025 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 167/SEK/SK.KA2.2/I/2025 tentang Penetapan Pemusnahan Arsip Pengadilan Tinggi Agama Padang. Jumlah arsip yang dimusnahkan kali ini sebanyak 426 berkas yang terdiri dari 171 berkas arsip bagian Kepaniteraan dan 255 berkas arsip bagian Kesekretariatan. Metode yang dilakukan untuk pemusnahan arsip adalah pencacahan dengan mesin penghancur kertas.

## Sidang Istimewa, Laporan Tahunan MARI Tahun 2024 19 Februari 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Dr. Abd. Hakim, M.H.I. mengikuti prosesi sidang laporan tahunan 2024 Mahkamah Agung RI. Sidang laporan Mahkamah Agung RI dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.



## Pembinaan Direktur Ditjen Badilag 25 Februari 2025

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI membuka kegiatan Pembinaan Pemberian Layanan Pengadilan bagi Penyandang Disabilitas dan Rapat Kerja Pengadilan Tinggi Agama Padang serta Pengadilan Agama se-Sumatera Barat, Selasa (25/2/2025), didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama.

**Ketua PTA Padang Pimpin Safari  
Ramadhan Sumbar  
5, 9, 11 Maret 2025**

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, Dr. Abd. Hakim, M.H.I., memimpin Tim Safari Ramadhan Provinsi Sumatera Barat di Masjid Baitul Amal (Tanah Datar), Masjid Nurul Islam (Solok), dan Masjid Nurul Iman (Dharmasraya). Pada setiap kegiatan, turut diserahkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.



**PTA Padang Ikuti Kegiatan Workshop Pengelolaan  
Perpustakaan Khusus oleh Perpusnas RI  
29 April 2025**

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan mutu pengelolaan perpustakaan, Pengadilan Tinggi Agama Padang mengikuti kegiatan Workshop Pengelolaan Perpustakaan Khusus yang diselenggarakan secara daring oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan PTA Padang, Ismail, S.H.I., M.A., Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga, Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H., serta arsiparis PTA Padang, Richa Meiliyana Rachmawati, A.Md.A.B.. Selain itu, workshop ini juga diikuti oleh para pustakawan dan pengelola perpustakaan dari berbagai instansi pemerintah di wilayah Sumatera.



## Wisuda Purnabakti Hakim Tinggi PTA Padang 6 Mei 2025

Pengadilan Tinggi Agama Padang menggelar acara Wisuda Purnabakti Hakim Tinggi untuk bapak Drs. Syafri Amrul, M.H.I., yang mengakhiri masa tugasnya pada bulan Mei 2025. Bertempat di Ruang Command Center, Pengadilan Tinggi Agama Padang



## Pengawasan Daerah Pengadilan Tinggi Agama Padang 15 Mei 2025



Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Agama Padang. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2025 melalui Aplikasi e-Binwas Badilag. Adapun objek pengawasan adalah Manajemen Peradilan, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan, Administrasi Umum, dan Kinerja Pelayanan Publik

## PTA Padang Laksanakan Qurban 1446 H 8 Juni 2025

Pengadilan Tinggi Agama Padang mengikuti Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) Mahkamah Agung RI secara online. Diklat ini diadakan oleh Badan Strajak, Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI c.q. Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan bekerjasama dengan Pusat Pelatihan SDM Arsip Nasional RI



## **Pengadilan Tinggi Agama Padang mengikuti Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi Srikandi 25 Juni 2025**

Pengadilan Tinggi Agama Padang mengikuti Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) Mahkamah Agung RI secara online. Diklat ini diadakan oleh Badan Strajak, Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI c.q. Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan bekerjasama dengan Pusat Pelatihan SDM Arsip Nasional RI



## **Pelantikan Hakim Tinggi dan 6 Ketua PA 26 Juni 2025**



Bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Agama Padang, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, Yang Mulia Dr. Abd. Hakim, M.H.I., melaksanakan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Hakim Tinggi serta enam Ketua Pengadilan Agama se-Sumatera Barat.

## **Tuaka Agama Beri Pembinaan di PTA Padang 26 Juni 2025**

Bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Agama Padang, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, Yang Mulia Dr. Abd. Hakim, M.H.I., melaksanakan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Hakim Tinggi serta enam Ketua Pengadilan Agama se-Sumatera Barat.



## **Kunjungan UIN Imam Bonjol Padang Program Pascasarjana 2 Juli 2025**



Sehubungan dengan undangan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang terkait Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 bertempat di Command Center Pengadilan Tinggi Agama Padang, kegiatan ini dihadiri oleh Seluruh Operator GLP dan Operator Aset/ Persediaan diSe-Sumatera Barat Di bawah Koordiantor Wilayah Sumatera Barat yang hadir secara daring .

## Konsolidasi Laporan Keuangan 10 Juli 2025

Sehubungan dengan undangan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang terkait Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 bertempat di Command Center Pengadilan Tinggi Agama Padang, kegiatan ini dihadiri oleh Seluruh Operator GLP dan Operator Aset/Persediaan Se-Sumatera Barat Di bawah Koordiantor Wilayah Sumatera Barat yang hadir secara daring.



## Bimtek Kaum Rentan Zona 3 Digelar Daring 25 Juli 2025

PTA Padang dan PTA Jambi sebagai penanggung jawab Zona 3 kegiatan Bimtek Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2025 secara daring yang terbagi dalam beberapa zona wilayah hukum. Bimbingan teknis kali ini mengangkat tema "Komunikasi terhadap Kaum Rentan", dengan menghadirkan narasumber Ibu Kuswardani Susari Putri, M.Si.



## Pembinaan PTA Padang di Kab. Sijunjung 11 Agustus 2025



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Dr. Abd. Hakim, M.H.I. dan Wakil Ketua Drs Alaidin, M.H. serta Panitera Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M., Hakim Tinggi Drs. Idris, S.H. dan Drs. Asfawi, M.H. dan Kabag Umum dan Keuangan Ismail, S.H.I., M.A. melakukan pembinaan. Pembinaan di ikuti oleh para Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Panitera pada Pengadilan Agama se Sumatera Barat bertempat di Gedung Lansek Manih Kantor Bupati Kab. Sijunjung.

## Kunjungan Kepala Kanwil DJPb Sumbar 12 September 2025

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat, Mohammad Dody Fachrudin, S.E., M.Si. beserta tim melakukan kunjungan ke PTA Padang. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka silaturahim sekaligus diskusi terkait pelaksanaan anggaran di lingkungan PTA Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat.



## **Lokakarya Pemutakhiran Instrumen Akreditasi Perpustakaan 24 September 2025**

Bertempat di Hotel Mercure, telah dilaksanakan kegiatan Lokakarya Pemutakhiran Instrumen Akreditasi Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Standarisasi dan Akreditasi Perpustakaan Nasional RI. Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam hal ini diwakili oleh Nurasih Handayani Rangkuti, S.H. Kasubbag Tata Usaha Dan Rumah Tangga.



## **Pelantikan KPTA Padang, Drs. Nur Khazim, M.H. 26 September 2025**



Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. DR. H. Sunarto, S.H., M.H. mengambil sumpah jabatan dan melantik Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang YM. Drs. Nur Khazim, M.H., bertempat di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung.

## **PTA Padang Lakukan Monev Badan Publik 8 Oktober 2025**

Pengadilan Tinggi Agama Padang berpartisipasi dalam Presentasi Badan Publik dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. PTA Padang hadir pada sesi III kegiatan yang dipimpin langsung oleh Ketua PTA Padang "Drs. H. Nur Khazim, M.H." didampingi Sekretaris "Dr. Irsyadi, S.Ag. M.Ag." serta Kasubag Kepegawaian dan TI "Berki Rahmat, S.Kom" sebagai operator pendamping.



## **PTA Padang Gelar Bimbingan Teknis Pengelolaan PNBP 3-4 November 2025**



Pengadilan Tinggi Agama Padang menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan PNBP bagi Pengadilan Agama se-Sumatera Barat di Hotel Pangeran Beach Padang. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Ditjen Badilag MA RI dan membahas E-Keuangan, E-Court, E-AC, Kinsatker, pengelolaan PNBP, serta penyusunan IKU dan Renstra guna mewujudkan pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

## Wisuda Purnabakti Hakim Tinggi PTA Padang 6 November 2025

Pengadilan Tinggi Agama Padang menggelar acara Wisuda Purnabakti Hakim Tinggi untuk bapak Drs. Bahrul Amzah, M.H., yang akan mengakhiri masa tugasnya. Bertempat di Ruang Command Center, Kantor Pengadilan Tinggi Agama Padang



## Hakim Tinggi PTA Padang Jadi Narasumber Permensos 7/2024 28 November 2025



YM Hakim Tinggi PTA Padang, Dra. Burnalis, M.A., menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, sebagai upaya memperkuat pemahaman dan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan sosial.

## PTA Padang Sambut Silaturahim Perguruan Tinggi Muhammadiyah 4 Desember 2025



Pengadilan Tinggi Agama Padang menerima kunjungan silaturahim Perguruan Tinggi Muhammadiyah guna membangun sinergi dan penguatan Sumber Daya Manusia bidang pendidikan dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang.

## PTA Padang Laksanakan Bimtek PBJ 9 Desember 2025



PTA Padang melaksanakan bimtek pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola dengan narasumber Aidil Akbar, S.E., Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda PTA Padang. Kegiatan ini diikuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Panitera Pengadilan Agama se-Sumatera Barat.

## Penyerahan Bantuan Bencana Alam 11 Desember 2025

PTA Padang, Drs. Nur Khazim, M.H., menyerahkan bantuan bencana alam secara simbolis kepada aparatur peradilan agama yang terdampak. Bantuan diterima oleh 4 pegawai Pengadilan Agama Painan sebagai perwakilan.



# PRESTASI & PENGHARGAAN

## PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

### TAHUN 2025



#### PTA Padang Raih Peringkat 2 Kategori Sedang Penyelesaian BMN

Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar Rapat Konsolidasi Keuangan Triwulan III Tahun 2025 secara daring melalui Zoom Meeting pada 9 Oktober 2025. Pengadilan Tinggi Agama Padang berhasil meraih Peringkat II Kategori Sedang dalam Penyelesaian Barang Milik Negara (BMN). Capaian ini menjadi bukti komitmen PTA Padang dalam meningkatkan tertib administrasi, akurasi pengelolaan, serta penyelesaian BMN secara tepat waktu dan akuntabel. Prestasi tersebut juga mencerminkan sinergi dan kerja keras seluruh jajaran dalam mendukung pengelolaan aset negara yang profesional dan bertanggung jawab.

#### Tiga Tahun Berturut-turut, PTA Padang Raih Nilai A SAKIP



Pengadilan Tinggi Agama Padang kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih nilai A atas evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama tiga tahun berturut-turut, yakni dari Tahun 2022 hingga 2024. Capaian ini mencerminkan konsistensi PTA Padang dalam menerapkan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang efektif, efisien, serta akuntabel. Prestasi tersebut menjadi bukti nyata komitmen seluruh jajaran PTA Padang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

# PRESTASI & PENGHARGAAN

## PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

### TAHUN 2025



## Berhasil Membina 3 Satker Raih Nilai Sempurna IKPA 2025, PTA Padang Terima Penghargaan

Pengadilan Tinggi Agama Padang menerima Piagam Penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat atas dedikasi dan peran aktif dalam pembinaan satuan kerja. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan 3 dari 38 satuan kerja di wilayah kerja Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam meraih nilai sempurna (100) pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2025.

Piagam penghargaan tersebut ditetapkan di Padang pada 21 Januari 2026 dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Mohammad Dody Fachrudin. Capaian ini menjadi wujud komitmen Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kinerja.

# PRESTASI & PENGHARGAAN

## PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH

### PTA PADANG TAHUN 2025



#### Pengadilan Agama Bukittinggi

Penghargaan dari Badilag atas capaian e-Court 100% Tahun 2024. Penghargaan diberikan tanggal 18 Februari 2025



#### Pengadilan Agama Bukittinggi

Penghargaan atas prestasi Akuntabilitas Kinerja dengan nilai A (81,60) Tahun 2024 (Penilaian Tahun 2025) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.



#### Pengadilan Agama Padang

Penghargaan atas prestasi Akuntabilitas Kinerja dengan nilai A (82,40) Tahun 2024 (Penilaian Tahun 2025) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

# PRESTASI & PENGHARGAAN

## PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH PTA PADANG TAHUN 2025



### Pengadilan Agama Padang

Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dengan kualifikasi Informatif dalam Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 kategori Lembaga Yudikatif oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.



### Pengadilan Agama Batusangkar

Penghargaan atas capaian IKPA 100 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kategori Pagu Kecil (<Pagu 20 Milyar) Semester I Tahun 2025 dari KPPN Bukittinggi



### Pengadilan Agama Batusangkar

Penghargaan atas Peringkat 4 Implementasi Digipay Semester II Tahun 2024. Penyerahan penghargaan pada 27 Mei 2025 dari KPPN Bukittinggi.

# PRESTASI & PENGHARGAAN

## PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH

### PTA PADANG TAHUN 2025



#### Pengadilan Agama Batusangkar

Penghargaan dari KPPN Bukittinggi atas Peringkat Kedua Satker Tercepat Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan Semester II Tahun 2024, diberikan pada tanggal 27 Mei 2025.



#### Pengadilan Agama Padang Panjang

Penghargaan atas prestasi Akuntabilitas Kinerja dengan nilai A (80,25) Tahun 2024 (Penilaian Tahun 2025) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.



#### Pengadilan Agama Padang Panjang

Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dengan kualifikasi Informatif dalam Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 kategori Lembaga Yudikatif oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

# PRESTASI & PENGHARGAAN

## PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH

### PTA PADANG TAHUN 2025



### Pengadilan Agama Padang Panjang

Penghargaan sebagai instansi Pemerintah di Kota Padang Panjang dengan Pelaksanaan Aktivasi Akun Coretax dan Kode Otorisasi Pegawai Tahun 2025 Teraktif dan Tercepat. Penghargaan diberikan pada 1 Desember 2025.



### Pengadilan Agama Pariaman

Penghargaan atas capaian e-Court 100% Tahun 2024. Penghargaan diberikan pada tanggal 18 Februari 2025.



### Pengadilan Agama Payakumbuh

Penghargaan atas Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dengan kualifikasi Informatif dalam pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 Kategori Lembaga Yudikatif.

# PRESTASI & PENGHARGAAN

## PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH

### PTA PADANG TAHUN 2025



#### Pengadilan Agama Sawahlunto

Atas Prestasi dalam Pengelolaan dan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025



#### Pengadilan Agama Sijunjung

Penghargaan atas Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dengan kualifikasi Informatif dalam pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 Kategori Lembaga Yudikatif.

# DAFTAR ISI

1	BAB I	PENDAHULUAN
7	BAB II	KEADAAN PERKARA PENYELESAIAN PERKARA PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
27	BAB III	SUMBER DAYA MANUSIA A. MUTASI B. PROMOSI C. PENSIUN D. DIKLAT
38	BAB IV	PENGELOLAAN KEUANGAN SARANA DAN PRASARANA, DAN TI
88	BAB V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
100	BAB VI	PENGAWASAN (INTERNAL DAN EVALUASI)
104	BAB VII	PENUTUP (KESIMPULAN DAN REKOMENDASI)



# BAB I

# PENDAHULUAN





Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **KEDUDUKAN**

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada dibawahnya, yaitu lingkungan Peradilan Umum, peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

## **WEWENANG**

1. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
2. Memeriksa dan memutus sengketakewenangan mengadili dan peninjauan kembali
3. memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi
4. memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum kepada lembaga negara dan pemerintahan
5. melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
6. mengelola organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya

## **VISI**

Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Padang yang Agung

## **VISI DAN MISI**

## **MISI**

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Padang
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Agama Padang



# TUGAS DAN FUNGSI



Dasar hukum Peradilan Agama dalam Undang Undang Dasar 1945 adalah diatur oleh Pasal 24 yang pada ayat (1) menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang dalam Pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang undang.

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu.

Dalam struktur Organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

# TUGAS DAN FUNGSI

(Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

## FUNGSI MENGADILI



1

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir “sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya.”

## FUNGSI PENGAWASAN



2

Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti didaerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat peradilan agama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

## FUNGSI PEMBINAAN



3

Memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

## FUNGSI NASEHAT



4

Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

## FUNGSI ADMINISTRASI



5

Menyelenggarakan administrasi peradilan dan administrasi umum. Administrasi peradilan meliputi administrasi perkara dan administrasi kepaniteraan. Sementara administrasi umum meliputi perencanaan, teknologi informasi, pelaporan, kepegawaian, dan keuangan.

## FUNGSI LAINNYA



6

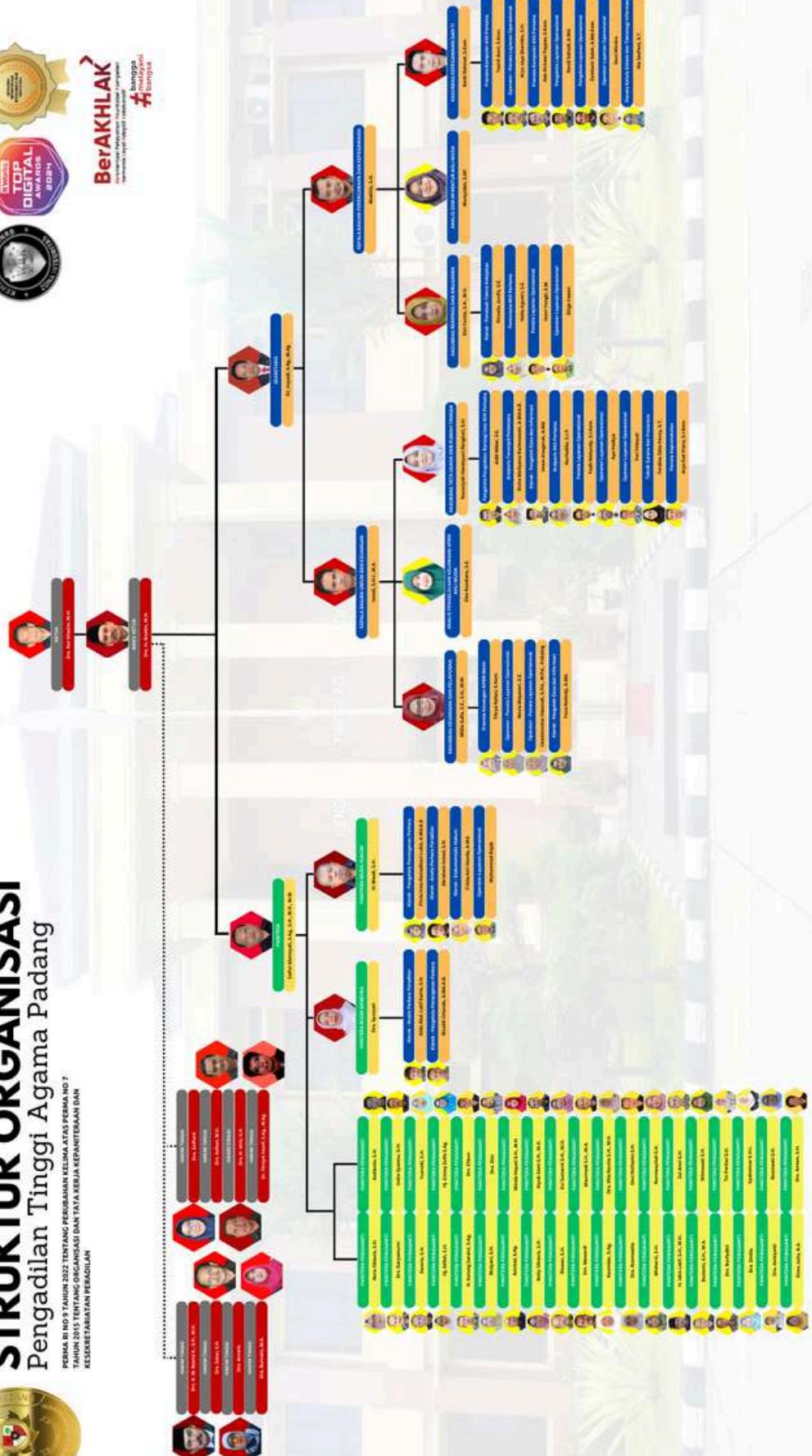
Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. Pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat kepada instansi pemerintah.

# STRUKTUR ORGANISASI

## STRUKTUR ORGANISASI

Pengadilan Tinggi Agama Padang

PERMENKES RI NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERMEN KESIATAN TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERIAAN DAN ESKERITARIAATAN PEGAWAIAN



# WILAYAH YURISDIKSI



60 km  
40 mi



“ Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai wilayah yurisdiksi 18 (delapan belas) Pengadilan Agama yang tersebar di Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat, yakni dengan satker kelas 1 A sebanyak 1 (satu) satuan kerja, kelas 1B sebanyak 5 (lima) satuan kerja, dan kelas 2 sebanyak 12 satuan kerja. ”

# BAB II

# MANAJEMEN

# PERKARA



# KEADAAN PERKARA TAHUN 2025



PEMOHON

PEMOHON

# KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

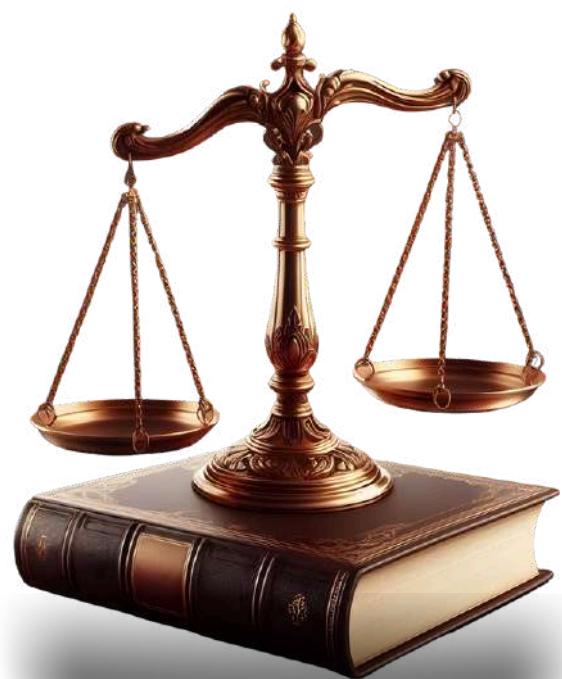


Pelayanan perkara sudah berjalan sesuai ketentuan dengan dukungan SDM, aplikasi SIPP, serta indikator kinerja telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditentukan.

Sisa perkara (perkara berjalan) Pengadilan Agama se Sumatera Barat tahun 2025 berjumlah 701 perkara. Sisa perkara ini terjadi disebabkan karena beberapa faktor diantaranya:

- Jumlah perkara yang ditangani dan kualitas perkara yang berbeda.
- Salah satu pihak ghaib/tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah RI, oleh karena itu pemanggilannya melalui pengumuman surat kabar atau media masa lain yang ditetapkan pengadilan dengan tenggat waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dengan kedua dan tenggat waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan (pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

- Salah satu pihak berstatus PNS/bekerja di BUMN sehingga harus menunggu ijin atasan untuk perceraianya.
- Perkara yang didaftarkan pada akhir tahun 2025.





# KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG



Tabel 1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Satker	Sisa 2024	Diterima 2025	Jumlah Perkara	Diputus		Sisa	
					Jumlah	%	Jumlah	%
1	PA Padang	170	2377	2547	2367	92,93%	180	7,07%
2	PA Pariaman	7	1261	1268	1240	98%	28	2,21%
3	PA Batusangkar	28	735	763	742	97%	21	2,75%
4	PA Bukittinggi	59	904	963	903	94%	60	6,23%
5	PA Payakumbuh	34	1003	1037	1037	92%	0	0,00%
6	PA Sawahlunto	0	204	204	200	98%	4	1,96%
7	PA Solok	4	508	512	504	98%	8	1,56%
8	PA Padang Panjang	14	364	378	357	94%	21	5,56%
9	PA Muara Labuh	34	559	593	552	93%	41	6,91%
10	PA Sijunjung	6	487	493	459	93%	34	6,90%
11	PA Koto Baru	6	901	907	898	99%	9	0,99%
12	PA Painan	36	1136	1172	1132	97%	40	3,41%
13	PA Lubuk Sikaping	4	672	676	665	98%	11	1,63%
14	PA Talu	77	1020	1097	1033	94%	64	5,83%
15	PA Maninjau	1	220	221	219	99,1%	2	0,90%
16	PA Tanjung Pati	8	733	741	713	96%	28	3,78%
17	PA Lubuk Basung	4	567	571	568	99%	3	0,53%
18	PA Pulau Punjung	26	829	855	841	98%	14	1,64%
Jumlah		518	14.480	14.998	14.430		568	



## KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG



Tabel 2. Keadaan Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Satker	Sisa 2024	Diterima 2025	Jumlah Banding	Diputus		Sisa	
					Jumlah	%	Jumlah	%
1	PA Padang	3	27	30	28	93%	2	6,67%
2	PA Pariaman	0	3	3	3	100%	0	0,00%
3	PA Batusangkar	0	3	3	3	100%	0	0,00%
4	PA Bukittinggi	0	14	14	14	100%	0	0,00%
5	PA Payakumbuh	0	6	6	6	100%	0	0,00%
6	PA Sawahlunto	0	0	0	0	100%	0	0,00%
7	PA Solok	0	5	5	5	100%	0	0,00%
8	PA Padang Panjang	0	3	3	3	100%	0	0,00%
9	PA Muara Labuh	0	3	3	3	100%	0	0,00%
10	PA Sijunjung	0	2	2	2	100%	0	0,00%
11	PA Koto Baru	1	2	3	2	67%	1	33,33%
12	PA Painan	0	5	5	5	100%	0	0,00%
13	PA Lubuk Sikaping	0	1	1	1	100%	0	0,00%
14	PA Talu	1	7	8	8	100%	0	0,00%
15	PA Maninjau	0	2	2	2	100%	0	0,00%
16	PA Tanjung Pati	1	2	3	3	100%	0	0,00%
17	PA Lubuk Basung	0	2	2	1	50%	1	50,00%
18	PA Pulau Punjung	0	1	1	1	100%	0	0,00%
Jumlah		6	88	94	90		4	



## KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG



Tabel 3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Satker	Perkara Kasasi Tahun 2025	Perkara Kasasi Putus Tahun 2025
1	PA Padang	9	9
2	PA Pariaman	0	0
3	PA Batusangkar	1	0
4	PA Bukittinggi	11	9
5	PA Payakumbuh	3	1
6	PA Sawahlunto	0	0
7	PA Solok	3	3
8	PA Padang Panjang	2	2
9	PA Muara Labuh	2	1
10	PA Sijunjung	1	1
11	PA Koto Baru	1	1
12	PA Painan	0	1
13	PA Lubuk Sikaping	0	0
14	PA Talu	3	2
15	PA Maninjau	1	1
16	PA Tanjung Pati	2	1
17	PA Lubuk Basung	0	0
18	PA Pulau Punjung	1	1
Jumlah		40	33

# **PENYELESAIAN PERKARA TAHUN 2025**





## JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Tabel 4. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu di Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang.

No	Satker	Diputus 1-3 Bulan	Diputus 4-5 Bulan	Diputus > 5 Bulan
1	PTA Padang	90	0	0
2	PA Padang	2198	151	18
3	PA Pariaman	1129	105	6
4	PA Batusangkar	666	72	4
5	PA Bukittinggi	814	88	1
6	PA Payakumbuh	950	5	2
7	PA Sawahlunto	188	12	0
8	PA Solok	485	19	0
9	PA Padang Panjang	355	0	2
10	PA Muara Labuh	535	17	0
11	PA Sijunjung	459	0	0
12	PA Koto Baru	861	36	1
13	PA Painan	1049	83	3
14	PA Lubuk Sikaping	637	28	0
15	PA Talu	978	42	13
16	PA Maninjau	207	11	1
17	PA Tanjung Pati	694	19	0
18	PA Lubuk Basung	565	565	0
19	PA Pulau Punjung	822	18	1
Jumlah		13.682	1.271	52

# **Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK pada Pengadilan Tinggi Agama Padang**



# KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG



Tabel 5. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2025 Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Satker	Perkara yang Diputus Tk. I Tahun 2025	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2025		Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2025	
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	PA Padang	2112	31	1.47%	2081	98.53%
2	PA Pariaman	1135	3	0.26%	1132	99.74%
3	PA Batusangkar	781	5	0.64%	776	99.36%
4	PA Bukittinggi	864	7	0.81%	857	99.19%
5	PA Payakumbuh	914	4	0.44%	910	99.56%
6	PA Sawahlunto	159	2	1.26%	157	98.74%
7	PA Solok	458	3	0.66%	455	99.34%
8	PA Padang Panjang	316	2	0.63%	314	99.37%
9	PA Muara Labuh	363	1	0.28%	362	99.72%
10	PA Sijunjung	361	1	0.28%	360	99.72%
11	PA Koto Baru	806	1	0.12%	805	99.88%
12	PA Painan	901	1	0.11%	900	99.89%
13	PA Lubuk Sikaping	660	2	0.30%	658	99.70%
14	PA Talu	953	5	0.52%	948	99.48%
15	PA Maninjau	245	0	0.00%	245	100.00%
16	PA Tanjung Pati	661	3	0.45%	658	99.55%
17	PA Lubuk Basung	465	2	0.43%	463	99.57%
18	PA Pulau Punjung	697	1	0.14%	696	99.86%
Jumlah		14137	92	10,50%	14045	93,86%



## KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG



Tabel 6. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2025  
Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Satker	Perkara yang Diputus Tk. Banding Tahun 2025	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2025	Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2025
1	PA Padang	28	9	19
2	PA Pariaman	2	0	2
3	PA Batusangkar	3	1	2
4	PA Bukittinggi	14	11	3
5	PA Payakumbuh	7	3	4
6	PA Sawahlunto	0	0	0
7	PA Solok	5	3	2
8	PA Padang Panjang	3	0	3
9	PA Muara Labuh	3	3	0
10	PA Sijunjung	2	0	2
11	PA Koto Baru	1	1	0
12	PA Painan	5	1	4
13	PA Lubuk Sikaping	1	0	1
14	PA Talu	8	3	5
15	PA Maninjau	2	1	1
16	PA Tanjung Pati	2	1	1
17	PA Lubuk Basung	1	0	1
18	PA Pulau Punjung	1	1	0
Jumlah		88	38	49

# JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PK PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG



Tabel 7. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2025  
Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Satker	Perkara yang Diputus Tk.I/Banding/Kasasi Tahun 2025	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2025	Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2025
1	PA Padang	2404	1	2403
2	PA Pariaman	2	0	2
3	PA Batusangkar	742	0	742
4	PA Bukittinggi	903	1	902
5	PA Payakumbuh	957	1	956
6	PA Sawahlunto	0	0	0
7	PA Solok	0	0	0
8	PA Padang Panjang	3	0	3
9	PA Muara Labuh	552	0	552
10	PA Sijunjung	459	1	458
11	PA Koto Baru	0	0	0
12	PA Painan	1132	0	1132
13	PA Lubuk Sikaping	665	0	665
14	PA Talu	1043	0	1043
15	PA Maninjau	222	0	222
16	PA Tanjung Pati	0	0	0
17	PA Lubuk Basung	568	0	568
18	PA Pulau Punjung	841	0	841

# **Jumlah Perkara Perdata yang berhasil melalui Mediasi**



# JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL MELALUI MEDIASI



Dari jumlah perkara yang diputus tahun 2025 pada Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang yang berhasil di mediasi sebanyak  
**1220 perkara**



# JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL MELALUI MEDIASI PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG



Tabel 8. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Melalui Mediasi Tahun 2025 Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Satker	Jumlah Perkara yang Dimediasi	Mediasi		Tidak Dapat Dilaksanakan	Sisa
			Tidak Berhasil	Berhasil*		
1	PA Padang	352	133	215	4	0
2	PA Pariaman	115	33	81	1	0
3	PA Batusangkar	105	11	91	3	0
4	PA Bukittinggi	186	45	132	6	3
5	PA Payakumbuh	149	47	85	0	17
6	PA Sawahlunto	38	2	31	5	0
7	PA Solok	66	16	48	1	1
8	PA Padang Panjang	89	7	68	11	3
9	PA Muara Labuh	37	12	16	2	2
10	PA Sijunjung	41	5	28	1	7
11	PA Koto Baru	73	12	59	2	0
12	PA Painan	73	16	48	9	3
13	PA Lubuk Sikaping	70	10	59	1	0
14	PA Talu	128	44	71	9	4
15	PA Maninjau	31	6	24	1	0
16	PA Tanjung Pati	80	0	78	1	1
17	PA Lubuk Basung	54	2	51	0	1
18	PA Pulau Punjung	39	5	33	1	0
Jumlah		1.726	406	1.220	58	42

# PROGRAM PRIORITAS NASIONAL



# POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

Pelaksanaan pelayanan Posbakum (pos bantuan hukum) di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tahun 2025 dengan total pagu anggaran Rp. 1.072.800.000 untuk 18 Pengadilan Agama se-Sumatera Barat telah berhasil direalisasikan 99,3% yaitu sebesar Rp. 1.066.784.600 dengan layanan sebanyak 12.662 orang

Tabel 9. Tabel Pos Bantuan Hukum Tahun 2025 pada Satuan Kerja Penerima Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	Satker	Anggaran	Realisasi		Orang
			Jumlah	(%)	
1	PA Padang	99.000.000	99.000.000	100%	1935
2	PA Pariaman	45.600.000	45.600.000	100%	456
3	PA Batusangkar	72.000.000	72.000.000	100%	720
4	PA Bukittinggi	72.000.000	71.769.600	100%	604
5	PA Payakumbuh	54.000.000	53.907.000	100%	540
6	PA Sawahlunto	7.000.000	7.000.000	100%	700
7	PA Solok	72.000.000	72.000.000	100%	720
8	PA Padang Panjang	31.400.000	31.400.000	100%	314
9	PA Muara Labuh	30.000.000	30.000.000	100%	300
10	PA Sijunjung	72.000.000	71.928.000	100%	720
11	PA Koto Baru	80.000.000	80.000.000	100%	826
12	PA Painan	62.000.000	62.000.000	100%	620
13	PA Lubuk Sikaping	55.600.000	55.600.000	100%	556
14	PA Talu	70.000.000	70.000.000	100%	700
15	PA Maninjau	46.200.000	40.655.000	88%	570
16	PA Tanjung Pati	96.000.000	95.961.000	100%	941
17	PA Lubuk Basung	72.000.000	72.000.000	100%	720
18	PA Pulau Punjung	36.000.000	35.964.000	100%	720
Jumlah		1.072.800.000	1.066.784.600	99.3%	12.662

# SIDANG LUAR GEDUNG

Sidang di luar gedung pengadilan adalah sidang yang diselenggarakan di luar gedung pengadilan, seperti kantor kecamatan, kantor KUA, atau fasilitas umum lainnya. Sidang ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke pengadilan.

- Pelaksanaan sidang di luar gedung di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tahun 2025 dengan total pagu anggaran Rp.783.765.000, berhasil direalisasikan sebesar Rp780.482.500 dengan jumlah perkara 945 perkara.



Tabel 10. Anggaran dan Realisasi Sidang Luar Gedung Tahun 2025  
PA se-Sumatera Barat

No	Satker	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perkara	Sisa Anggaran
1	PA Padang	50,500,000	50,320,000	46	180,000
2	PA Pariaman	22,500,000	22,500,000	14	0
3	PA Batusangkar	36,000,000	36,000,000	70	0
4	PA Bukittinggi	26,720,000	26,710,000	44	10,000
5	PA Payakumbuh	37,920,000	37,920,000	40	0
6	PA Sawahlunto	38,000,000	37,200,000	12	800,000
7	PA Solok	61,600,000	61,600,000	18	0
8	PA Padang Panjang	31,500,000	30,777,500	10	722,500
9	PA Muara Labuh	27,400,000	27,400,000	42	0
10	PA Sijunjung	38,625,000	38,305,000	40	320,000
11	PA Koto Baru	86,000,000	86,000,000	84	0
12	PA Painan	12,500,000	12,500,000	20	0
13	PA Lubuk Sikaping	52,500,000	51,250,000	134	1,250,000
14	PA Talu	30,000,000	30,000,000	30	0
15	PA Maninjau	42,000,000	42,000,000	46	0
16	PA Tanjung Pati	140,800,000	140,800,000	199	0
17	PA Lubuk Basung	20,300,000	20,300,000	29	0
18	PA Pulau Punjung	28,900,000	28,900,000	67	0
Jumlah		783,765,000	780,482,500	945	3,282,500

# PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Pada Tahun 2025, seluruh Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang memperoleh anggaran Pembebasan Biaya Perkara (prodeo).

- Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang menerima anggaran prodeo dari DIPA 04 sejumlah Rp.330.330.000. Pengadilan Agama se-Sumatera Barat telah berhasil direalisasikan sebesar Rp.182.530.505 untuk 1.461 perkara.



Tabel 11. Anggaran dan Realisasi Pembebasan Biaya Perkara  
Tahun 2025 PA se-Sumatera Barat

No	Satker	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perkara	Sisa Anggaran
1	PA Padang	72,000,000	40,954,005	224	31,045,995
2	PA Pariaman	12,000,000	7,125,000	30	4,875,000
3	PA Batusangkar	6,720,000	4,200,000	42	2,520,000
4	PA Bukittinggi	8,750,000	7,956,500	50	793,500
5	PA Payakumbuh	7,410,000	6,722,000	77	688,000
6	PA Sawahlunto	4,100,000	1,107,000	21	2,993,000
7	PA Solok	15,000,000	6,679,000	50	8,321,000
8	PA Padang Panjang	13,600,000	4,068,000	40	9,532,000
9	PA Muara Labuh	14,200,000	7,909,000	56	6,291,000
10	PA Sijunjung	13,375,000	12,701,000	78	674,000
11	PA Koto Baru	27,750,000	26,078,500	203	1,671,500
12	PA Painan	15,000,000	15,000,000	50	0
13	PA Lubuk Sikaping	36,500,000	6,474,000	259	30,026,000
14	PA Talu	15,000,000	7,849,000	46	7,151,000
15	PA Maninjau	3,900,000	3,900,000	35	0
16	PA Tanjung Pati	48,150,000	15,037,500	90	33,112,500
17	PA Lubuk Basung	10,500,000	6,670,000	75	3,830,000
18	PA Pulau Punjung	6,375,000	2,100,000	35	4,275,000
Jumlah		330,330,000	182,530,505	1,461	147,799,495



## SIDANG TERPADU

Pelaksanaan pelayanan sidang terpadu di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang pada Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan pada 3 Pengadilan Agama se-Sumatera Barat. Dari total pagu anggaran sebesar Rp29.250.000, realisasi anggaran mencapai 99,5% atau sebesar Rp29.095.600, dengan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak 102 perkara.

Tabel 12. Anggaran dan Realisasi Sidang Terpadu Tahun 2025 pada PA se-Sumatera Barat

No	Satker	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perkara	Sisa Anggaran
1	PA Padang				
2	PA Pariaman	0	0	0	0
3	PA Batusangkar	0	0	0	0
4	PA Bukittinggi	11,800,000	11,795,000	21	5,000
5	PA Payakumbuh	0	0	0	0
6	PA Sawahlunto	0	0	0	0
7	PA Solok	0	0	0	0
8	PA Padang Panjang	0	0	0	0
9	PA Muara Labuh	0	0	0	0
10	PA Sijunjung	0	0	0	0
11	PA Koto Baru	0	0	0	0
12	PA Painan	0	0	0	0
13	PA Lubuk Sikaping	8,450,000	8,300,000	55	150,000
14	PA Talu	0	0	0	0
15	PA Maninjau	0	0	0	0
16	PA Tanjung Pati	0	0	0	0
17	PA Lubuk Basung	9,000,000	9,000,000	26	0
18	PA Pulau Punjung	0	0	0	0
Jumlah		29.250.000	29.095.000	102	155.000



# BAB III

# SUMBER DAYA

# MANUSIA



Aparatur peradilan merupakan sumber daya manusia yang memegang peranan penting dan strategis dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan serta pelaksanaan roda pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan Good Governance. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia aparatur peradilan dituntut untuk dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan agar mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan peradilan secara efektif, efisien, profesional, serta berintegritas.

Sumber daya manusia aparatur peradilan agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu sumber daya manusia teknis dan sumber daya manusia non teknis, yang masing-masing memiliki peran dan fungsi yang saling mendukung dalam penyelenggaraan administrasi peradilan.

**1. Sumber Daya Manusia Teknis** terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, serta Panitera Pengganti, yang secara langsung melaksanakan fungsi yudisial dan teknis peradilan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan.

**2. Sumber Daya Manusia Non Teknis** terdiri atas Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, pejabat fungsional, serta pelaksana, yang bertugas mendukung kelancaran administrasi, pengelolaan organisasi, keuangan, kepegawaian, serta sarana dan prasarana peradilan.



Sebaran sumber daya manusia pada Pengadilan Agama, baik sumber daya manusia teknis maupun non teknis, disajikan dalam Matriks Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Adapun matriks sumber daya manusia pada Pengadilan Tinggi Agama Padang disajikan pada tabel berikut, yang menggambarkan kondisi, komposisi, serta ketersediaan aparatur peradilan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan secara optimal.

**Tabel 13. Matriks Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2025  
Pengadilan Tinggi Agama Padang**

NO	NAMA	JABATAN	
1	Drs. Nur Khazim, M.H.	Ketua	
2	Drs Alaidin, M.H.	Wakil Ketua	
3	Dra. Burnalisa, M.A.	Hakim Tinggi	
4	Dra. Zulfiarti	Hakim Tinggi	
5	Drs. Asfawi, M.H.	Hakim Tinggi	
6	Dra. Arnetis	Hakim Tinggi	
7	Drs M. Nasrul K, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
8	Drs. Salwi, S.H.	Hakim Tinggi	
9	Dr. Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.	Hakim Tinggi	
10	Drs. H. Idris, S.H.	Hakim Tinggi	
11	Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.	Panitera	
12	Dr. Irsyadi, S.Ag., M.Ag.	Sekretaris	
13	Mukhlis, S.H.	Kabag Perencanaan dan Kepgawaiian	
14	Masdi, S.H.	Panitera Muda Hukum	
15	Ismail, S.H.I., M.A.	Kabag Umum dan Keuangan	
16	Dra. Syuryati	Panitera Muda Banding	
17	Idris Latif, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
18	Bustami, S.H., M.A.	Panitera Pengganti	
19	Minda Hayati, S.H., M.H	Panitera Pengganti	
20	Damris, S.H.	Panitera Pengganti	
21	Masrinedi, S.H., M.A.	Panitera Pengganti	
22	Drs Armen, S.H.	Panitera Pengganti	
23	Aiyub Sami, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
24	Riswan, S.H.	Panitera Pengganti	
25	Drs. Efizon	Panitera Pengganti	
26	Dra. Nila Novita, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
27	Hj. Emmy Zulfa, S.Ag.	Panitera Pengganti	
28	Evi Sumarni, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
29	Amrizal, S.Ag.	Panitera Pengganti	
30	Indra Syamsu, S.H.	Panitera Pengganti	
31	Alifah, S.H.	Panitera Pengganti	
32	Dra. Rusmawita	Panitera Pengganti	
33	Mulyani, S.H.	Panitera Pengganti	
34	Rosniwati, S.H.	Panitera Pengganti	
35	Dra. Emilia	Panitera Pengganti	
36	Drs. Nurfadhil	Panitera Pengganti	
37	Drs. Mawardi	Panitera Pengganti	
38	Asdianto, S.H.	Panitera Pengganti	
39	Nilmawati, S.H.	Panitera Pengganti	
40	Dra. Asmiyetti	Panitera Pengganti	
41	Meirita, S.H.	Panitera Pengganti	
42	Misharni, S.H.	Panitera Pengganti	
43	Nora Oktavia, S.H.	Panitera Pengganti	
44	Kutung Saraini, S.Ag.	Panitera Pengganti	
45	Drs. Daryamurni	Panitera Pengganti	
46	Syahminar, S.H.I.	Panitera Pengganti	
47	Dra. Elni	Panitera Pengganti	
48	Nurmasiyah, S.H.	Panitera Pengganti	
49	Tin Pertiwi, S.H.	Panitera Pengganti	
50	Yusnelli, S.H.	Panitera Pengganti	
51	Zul Amri, S.H.	Panitera Pengganti	
52	Devi Nofianto, S.H.	Panitera Pengganti	
53	Nelly Oktavia, S.H.	Panitera Pengganti	
54	Etma Juita, B.A.	Panitera Pengganti	
55	Elvi Yunita, S.H., M.H.	Kasub Rencana Program dan Anggaran	
56	Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H.	Kasub Tata Usaha dan Rumah Tangga	
57	Millia Sufia, S.E., S.H., M.M.	Kasub Keuangan dan Pelaporan	
58	Berki Rahmat, S.Kom.	Kasub Kepegawaian dan TI	
59	Elsa Rusdiana, S.E.	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	
60	Mursyidah, S.AP.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	
61	Aidil Akbar, S.E.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	
62	Yasirli Amri, S.Kom.	Klerek - Pengelola Sistem dan TI	
63	Arya Jaya Shentika, S.H.	Operator - Penata Layanan Operasional	
64	Ade Armawi Paypas, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	
65	Fitrya Rafani, S.Kom.	Pranata Keuangan APBN Mahir	
66	Uswatunnisa Hasanah, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Operator - Penata Layanan Operasional	
67	Abraham Ismed, S.H., M.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	
68	Aldo Abd. Latif Karim, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	
69	Riccelia Junifa, S.E.	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	
70	Nia Sesfiani, S.T.	Penata Kelola Sistem dan TI	
71	Ferdina Okta Fenny, S.T.	Teknisi Sarana dan Prasarana	
72	Arya Dwi Putra, S.I.Kom.	Klerek - Penata Keprotokolan	
73	Richa Meiliyana Rachmawati, A.Md.A.B.	Arsiparis Terampil	
74	Yova Nelindy, A.Md.	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	
75	Friska Azri Nanda, A.Md.	Klerek - Dokumentalis Hukum	
76	Rinaldi Orlando, A.Md.A.B.	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	
77	Fitria Irma Ramadhani Lubis, A.Md.A.B	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	
78	Imam Anugerah, A.Md	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	
79	Nella Agustri, S.E.	Perencana Ahli Pertama	
80	HUTRI YENGKI, S.M.	Operator - Penata Layanan Operasional	
81	Nurfadilla, S.I.P.	Arsiparis Ahli Pertama	
82	FADIL WAHYUDY, S.I.Kom.	Operator - Penata Layanan Operasional	
83	RANDI SAHADI, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional	
84	ZAMHARIR SALEH, A.Md.Kom.	Pengelola Layanan Operasional	
85	MUHAMMAD RAJAB	Operator Layanan Operasional	
86	DIRGA IRAWAN	Operator Layanan Operasional	
87	DONI WINDRA	Operator Layanan Operasional	
88	AYE HADIYA	Operator Layanan Operasional	
89	FERI HIDAYAT	Operator Layanan Operasional	

# REKAPITULASI SDM TEKNIS DAN NON TEKNIS TAHUN 2025 WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

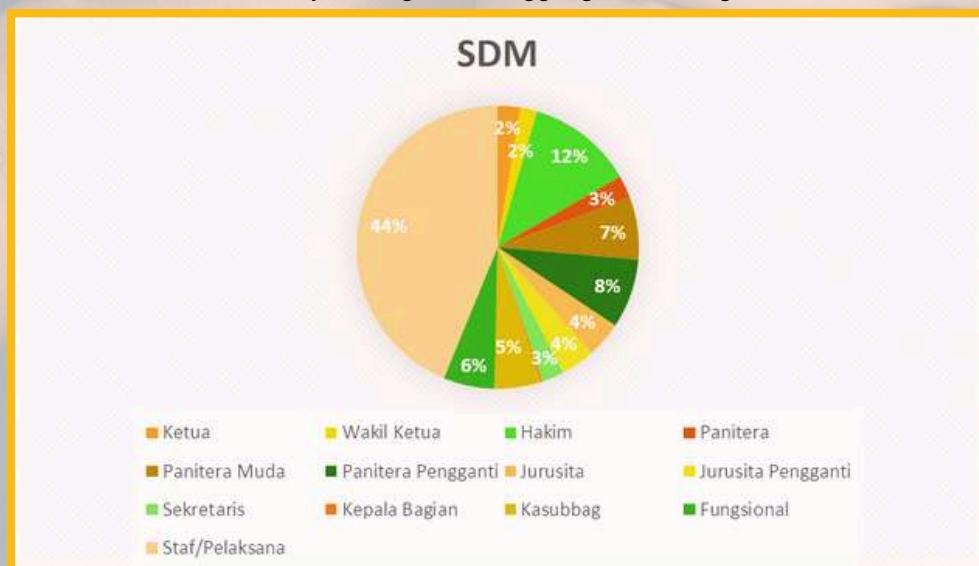


Tabel 14. Rekapitulasi SDM Teknis dan non Teknis Tahun 2025 Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Unit Kerja	SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS DAN NON TEKNIS													
		Ketua	Wakil Ketua	Hakim	Panitera	Panitera Muda	Panitera Pengganti	Jurisita	Jurisita Pengganti	Sekretaris	Kepala Bagian	Kasubbag	Fungsional	Staf/Pelaksana	Total
1	PTA Padang	1	1	8	1	2	37	0	0	1	2	4	7	24	88
2	PA Padang Kelas IA	1	1	17	1	3	9	4	2	1	0	3	5	21	68
3	PA Pariaman Kelas IB	1	1	4	1	3	1	3	2	1	0	2	3	20	42
4	PA Batusangkar Kelas IB	1	1	5	1	3	0	1	2	1	0	3	3	22	43
5	PA Bukittinggi Kelas IB	1	1	3	1	3	1	3	1	1	0	3	2	18	38
6	PA Payakumbuh Kelas IB	1	1	5	1	3	2	4	1	1	0	2	3	18	42
7	PA Tanjung Pati Kelas IB	1	1	7	1	3	1	3	1	1	0	2	1	15	37
8	PA Sawahlunto	1	1	1	1	2	1	0	2	1	0	2	2	12	26
9	PA Solok	1	0	4	1	3	1	0	2	1	0	2	2	15	32
10	PA Padang Panjang	1	1	2	1	3	1	1	2	1	0	2	3	17	35
11	PA Muara Labuh	1	1	2	1	2	0	1	0	1	0	0	2	17	28
12	PA Sijunjung	1	1	4	1	2	0	1	1	1	0	2	0	14	28
13	PA Koto Baru	1	0	6	1	3	1	1	3	1	0	2	1	16	36
14	PA Painan	1	1	6	1	2	0	2	2	1	0	1	1	17	35
15	PA Lubuk Sikaping	1	1	2	1	3	0	1	2	1	0	1	0	16	29
16	PA Talu	1	0	7	1	3	1	1	0	1	0	1	2	15	33
17	PA Maninjau	1	0	2	1	3	1	1	2	1	0	2	2	13	29
18	PA Lubuk Basung	1	0	2	1	3	0	2	2	1	0	2	3	16	33
19	PA Pulau Punjung	1	1	2	1	3	1	1	1	1	0	2	1	14	29
<b>JUMLAH</b>		<b>19</b>	<b>14</b>	<b>89</b>	<b>19</b>	<b>52</b>	<b>58</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>320</b>	<b>731</b>

Sumber: Sikep Mahkamah Agung

Grafik 1. Sebaran SDM Teknis dan non Teknis Tahun 2025  
Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang



Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah pegawai teknis dan non teknis Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat sejumlah 731 orang.

Berikut disajikan grafik sebaran sumber daya manusia, baik aparatur teknis maupun non teknis, pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se-Provinsi Sumatera Barat.

# KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN

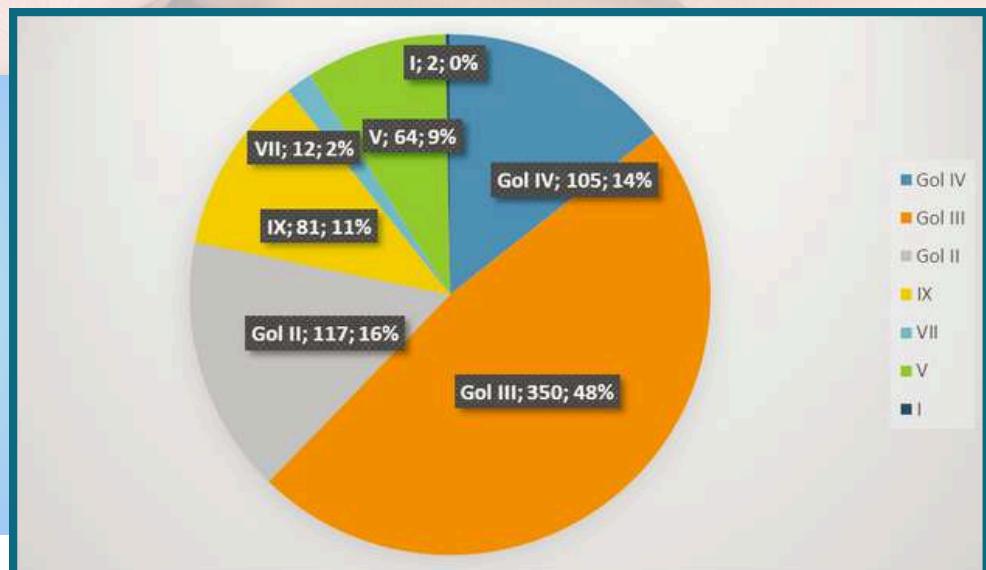


Tabel 14. Rekapitulasi SDM Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2025 di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Golongan Ruang	Jumlah (orang)	Percentase (%)
1	Golongan IV	105	14,36
2	Golongan III	350	47,88
3	Golongan II	117	16,01
5	IX	81	11,08
6	VII	12	1,64
7	V	64	8,76
8	I	2	0,27
<b>Jumlah</b>		<b>731</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Siken Mahkamah Agung*

Grafik 2. Sebaran SDM Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2025 di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang



Sebagian besar sumber daya manusia di Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat dari segi golongan ruang berada pada golongan III sebanyak 350 atau 47,88%.

Berikut disajikan sebaran sumber daya manusia aparatur peradilan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se-Provinsi Sumatera Barat berdasarkan golongan ruang dan kepangkatan.

# KOMPOSISI SDM BERDASARKAN PENDIDIKAN



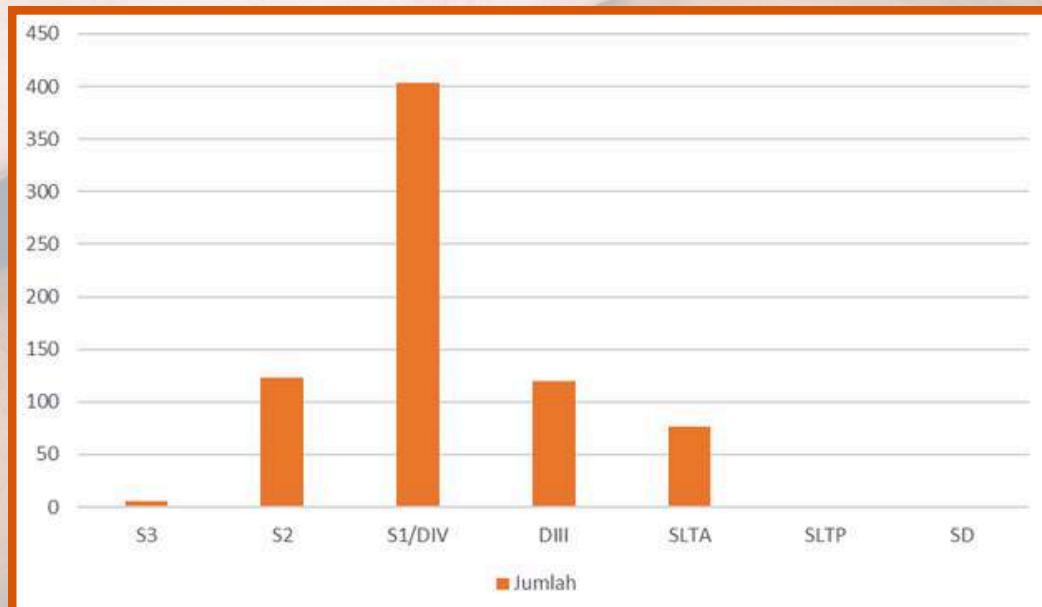
Tabel 15. Rekapitulasi SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan  
Tahun 2025 di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Percentase (%)
1	S3	6	0.82
2	S2	123	16.83
3	S1/DIV	403	55.13
4	DIII	120	16.42
5	SLTA	77	10.53
6	SLTP	1	0.14
7	SD	1	0.14
<b>Jumlah</b>		<b>731</b>	<b>100%</b>

Sumber: Siken Mahkamah Agung

Sebagian besar sumber daya manusia berdasarkan jenjang pendidikan berpendidikan Strata I (S1), yaitu sebanyak 403 orang atau 55,13% dari total aparatur.

Grafik 3. Sebaran SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan  
Tahun 2025 di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang



Sebaran sumber daya manusia berdasarkan jenjang pendidikan disajikan dalam bentuk diagram guna memberikan gambaran mengenai komposisi dan proporsi aparatur peradilan pada setiap tingkat pendidikan.

# MUTASI JABATAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS.

Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI telah melaksanakan Promosi dan Mutasi. Berikut data mutasi masuk dan keluar Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat selama tahun 2025 seperti yang terlihat pada tabel disamping.

Data mutasi dari dan ke lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang selama tahun 2025 terdiri dari 78 orang yang mutasi keluar dan 251 orang yang mutasi masuk ke lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Tabel 16. Matriks Data Mutasi Tahun 2025 PA se-Sumatera Barat

No	Satker	Mutasi Keluar	Mutasi Masuk
1	PTA Padang	2	24
2	PA Padang	8	8
3	PA Pariaman	5	21
4	PA Batusangkar	4	25
5	PA Bukittinggi	5	19
6	PA Payakumbuh	3	27
7	PA Sawahlunto	4	4
8	PA Solok	4	20
9	PA Padang Panjang	4	4
10	PA Muara Labuh	5	3
11	PA Sijunjung	3	9
12	PA Koto Baru	6	8
13	PA Painan	2	12
14	PA Lubuk Sikaping	2	7
15	PA Talu	8	18
16	PA Maninjau	5	17
17	PA Tanjung Pati	5	19
18	PA Lubuk Basung	3	19
19	PA Pulau Punjung	2	11
Jumlah		78	251

# PROMOSI JABATAN



Tabel 17. Matriks Data Promosi Tahun 2025  
PA se-Sumatera Barat

No	Satker	Pimpinan	Hakim	Kepaniteraan	Kesekretariatan
1	PTA Padang	0	0	0	1
2	PA Padang	2	0	7	1
3	PA Pariaman	0	1	5	1
4	PA Batusangkar	2	0	2	0
5	PA Bukittinggi	0	0	2	0
6	PA Payakumbuh	1	4	2	0
7	PA Sawahlunto	0	1	1	0
8	PA Solok	1	1	1	0
9	PA Padang Panjang	0	1	2	1
10	PA Muara Labuh	1	2	6	0
11	PA Sijunjung	1	1	2	0
12	PA Koto Baru	1	8	5	1
13	PA Painan	0	1	1	0
14	PA Lubuk Sikaping	0	1	1	0
15	PA Talu	1	4	3	1
16	PA Maninjau	1	1	4	1
17	PA Tanjung Pati	1	0	2	1
18	PA Lubuk Basung	0	3	0	0
19	PA Pulau Punjung	0	1	3	1
Jumlah		12	30	49	8

# PENSIUN



Data pensiun di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang selama tahun 2025 terdiri dari Hakim 11 orang, Kepaniteraan 6 orang, dan Kesekretariatan 3 orang.

Tabel 18. Matriks Data Pensiun Tahun 2025  
PA se-Sumatera Barat

No	Satker	Hakim	Kepaniteraan	Kesekretariatan	Ket (BUP/MD)	
					BUP	MD
1	PTA Padang	2	3	0	5	0
2	PA Padang	8	2	0	9	1
3	PA Pariaman	1	0	0	1	0
4	PA Batusangkar	0	0	0	0	0
5	PA Bukittinggi	0	0	0	0	0
6	PA Payakumbuh	0	0	0	0	0
7	PA Sawahlunto	0	0	0	0	0
8	PA Solok	0	0	0	0	0
9	PA Padang Panjang	0	0	0	0	0
10	PA Muara Labuh	0	0	1	1	0
11	PA Sijunjung	0	0	0	0	0
12	PA Koto Baru	0	1	0	1	0
13	PA Painan	0	0	1	0	1
14	PA Lubuk Sikaping	0	0	0	0	0
15	PA Talu	0	0	0	0	0
16	PA Maninjau	0	0	1	1	0
17	PA Tanjung Pati	0	0	0	0	0
18	PA Lubuk Basung	0	0	0	0	0
19	PA Pulau Punjung	0	0	0	0	0
Jumlah		11	6	3	18	2

# DIKLAT

Rekap data peserta diklat tahun 2025 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang terdiri atas pelatihan struktural kepemimpinan sebanyak 2 orang, pelatihan teknis 996 orang, pelatihan fungsional 17 orang, dan pelatihan dasar, diklat online, workshop sebanyak 265 orang.



Tabel 19. Matriks Data Diklat Tahun 2025  
PA se-Sumatera Barat

No	Satker	Pelatihan Struktural Kepemimpinan	Pelatihan Teknis	Pelatihan Fungsional	Pelatihan Dasar, Diklat Online, Workshop/Lokakarya
1	PTA Padang				
2	PA Padang	0	4	0	166
3	PA Pariaman	0	11	3	32
4	PA Batusangkar	0	0	0	109
5	PA Bukittinggi	0	15	0	78
6	PA Payakumbuh	0	5	0	84
7	PA Sawahlunto	0	11	0	21
8	PA Solok	0	4	0	124
9	PA Padang Panjang	0	4	0	120
10	PA Muara Labuh	0	0	1	97
11	PA Sijunjung	0	19	0	31
12	PA Koto Baru	1	52	0	3
13	PA Painan	0	2	0	64
14	PA Lubuk Sikaping	0	10	0	6
15	PA Talu	0	10	3	4
16	PA Maninjau	0	25	0	13
17	PA Tanjung Pati	0	19	1	9
18	PA Lubuk Basung	0	33	3	44
19	PA Pulau Punjung	0	4	0	23
Jumlah		1	228	11	1028

# Berdasarkan Jenis Kompetensi

Tabel 20. Data Diklat Berdasarkan Jenis Kompetensi  
Tahun 2025 PA se-Sumatera Barat

No	Jenis Kompetensi	Jumlah (Orang)
1	Pelatihan Struktural Kepemimpinan	0
2	Pelatihan Teknis	792
3	Pelatihan Fungsional	11
4	Pelatihan Dasar, Diklat Online, Workshop/Lokakarya	95
Jumlah		898



# BAB IV

# PENGELOLAAN KEUANGAN, ▼

# SARANA DAN PRASARANA,

# DAN TEKNOLOGI

# INFORMASI





DJPPB  
Indonesian Treasury

# PENGELOLAAN KEUANGAN DI WILAYAH PTA PADANG TAHUN 2025

## DIPA 01 Badan Urusan Administrasi



Pagu:  
Rp.107.584.123.000



Realisasi:  
Rp.106.530.193.613



99,02%

## DIPA 04 Badan Peradilan Agama



Pagu:  
Rp.2.513.302.000



Realisasi:  
Rp.2.290.262.405



91,13%

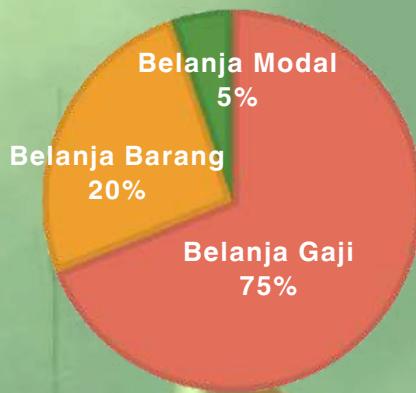
Pada tahun 2025, Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat untuk DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.107.584.123.000**, terealisasi sebesar **Rp.106.530.193.613** atau **99,02%**.

Pada tahun 2025, Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat untuk DIPA 04 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.2.513.302.000**, terealisasi sebesar **Rp.2.290.262.405** atau **91,13%**.

# DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama



Tabel 21. Realisasi DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)  
Tahun 2025 PA se-Sumatera Barat

No	Satker	Pagu Anggaran	Realisasi				Percentase (%)
			B. Pegawai	B. Barang	Modal	Jumlah	
1	PTA Padang	19,942,278,000	15,566,074,646	3,436,224,497	886,972,252	19,889,271,395	99.73%
2	PA Padang	15,665,342,000	14,012,173,448	1,110,348,176	496,609,280	15,619,130,904	99.71%
3	PA Batusangkar	5,336,798,000	3,738,193,492	1,013,713,209	479,306,497	5,231,213,198	98.02%
4	PA Bukittinggi	4,893,745,000	3,132,452,872	1,575,913,109	178,073,970	4,886,439,951	99.85%
5	PA Pariaman	5,767,946,000	4,532,243,687	1,038,239,972	137,148,280	5,707,631,939	98.95%
6	PA Koto Baru	4,607,474,000	2,963,861,210	948,458,087	621,221,512	4,533,540,809	98.40%
7	PA Lubuk Basung	3,383,472,000	2,361,140,476	925,202,777	87,747,900	3,374,091,153	99.72%
8	PA Lubuk Sikaping	4,663,875,000	2,388,923,775	988,101,730	1,255,321,880	4,632,347,385	99.32%
9	PA Maninjau	3,245,910,000	2,381,599,528	842,128,378	0	3,223,727,906	99.32%
10	PA Muara Labuh	3,210,843,000	2,170,112,268	932,234,481	7,100,000	3,109,446,749	96.84%
11	PA Padang Panjang	3,980,356,000	2,822,798,123	958,861,825	134,304,800	3,915,964,748	98.38%
12	PA Painan	4,306,984,000	2,975,933,868	999,822,010	143,768,514	4,119,524,392	95.65%
13	PA Payakumbuh	4,517,705,000	3,376,538,548	1,022,034,771	98,834,560	4,497,407,879	99.55%
14	PA Sawahlunto	3,317,090,000	2,220,804,963	800,798,007	269,022,225	3,290,625,195	99.20%
15	PA Sijunjung	3,830,517,000	2,697,795,959	1,032,139,333	48,499,996	3,778,435,288	98.64%
16	PA Solok	3,545,277,000	2,552,293,955	886,284,329	15,000,000	3,453,578,284	97.41%
17	PA Talu	4,715,211,000	3,397,908,307	911,580,834	357,808,500	4,667,297,641	98.98%
18	PA Tanjung Pati	5,363,718,000	4,107,824,261	1,126,830,045	102,560,600	5,337,214,906	99.51%
19	PA Pulau Punjung	3,289,582,000	2,235,269,673	929,034,218	99,000,000	3,263,303,891	99.20%
Jumlah		107,584,123,000	79,633,943,059	21,477,949,788	5,418,300,766	106,530,193,613	99.02%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran PTA Padang dan PA se-Sumatera Barat Tahun 2025

Pada tahun 2025, Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat untuk DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.107,584,123,000**, yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Sedangkan untuk Tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.87.610.836.000**.

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan anggaran sebesar **22,80%** atau sebesar **Rp.19.973.287.000**. Kemudian Pada Tahun 2023, Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat mendapatkan pagu anggaran DIPA 01 sebesar **Rp.88.932.137.000** Alokasi anggaran dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada diagram sebagai berikut:



## DIPA 01 BELANJA PEGAWAI



Alokasi anggaran belanja pegawai untuk tahun anggaran 2025 di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang memperoleh pagu sebesar Rp.80.521.239.000

Tabel 22. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Satker	Pagu	Realisasi	(%) Realisasi	Sisa
1	PTA Padang	15.618.211.000	15.566.074.646	100	52.136.354
2	PA Padang	14.057.404.000	14.012.173.448	100	45.230.552
3	PA Batusangkar	3.829.947.000	3.738.193.492	98	91.753.508
4	PA Bukittinggi	3.136.283.000	3.132.452.872	100	3.830.128
5	PA Pariaman	4.585.531.000	4.532.243.687	99	53.287.313
6	PA Koto Baru	3.021.203.000	2.963.861.210	98	57.341.790
7	PA Lubuk Basung	2.370.039.000	2.361.140.476	100	8.898.524
8	PA Lubuk Sikaping	2.411.608.000	2.388.923.775	99	22.684.225
9	PA Maninjau	2.401.775.000	2.381.599.528	99	20.175.472
10	PA Muara Labuh	2.266.919.000	2.170.112.268	96	96.806.732
11	PA Padang Panjang	2.842.322.000	2.822.798.123	99	19.523.877
12	PA Painan	3.156.619.000	2.975.933.868	94	180.685.132
13	PA Payakumbuh	3.393.580.000	3.376.538.548	99	17.041.452
14	PA Sawahlunto	2.242.121.000	2.220.804.963	99	21.316.037
15	PA Sijunjung	2.746.334.000	2.697.795.959	98	48.538.041
16	PA Solok	2.609.483.000	2.552.293.955	98	57.189.045
17	PA Talu	3.437.507.000	3.397.908.307	99	39.598.693
18	PA Tanjung Pati	4.134.215.000	4.107.824.261	99	26.390.739
19	PA Pulau Punjung	2.260.138.000	2.235.269.673	99	24.868.327
Jumlah		80.521.239.000	77.398.673.386	96	862.427.614

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran PTA Padang dan PA se-Sumatera Barat Tahun 2025

## DIPA 01 BELANJA BARANG



Alokasi anggaran belanja barang untuk tahun anggaran 2025 di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang memperoleh pagu sebesar Rp.21.601.372.000,-

Tabel 23. Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Satker	Pagu	Realisasi	(%) Realisasi	Sisa
1	PTA Padang	3.437.088.000	3.436.224.497	100	863.503
2	PA Padang	1.110.938.000	1.110.348.176	100	589.824
3	PA Batusangkar	1.026.111.000	1.013.713.209	99	12.397.791
4	PA Bukittinggi	1.576.112.000	1.575.913.109	100	198.891
5	PA Pariaman	1.042.213.000	1.038.239.972	100	3.973.028
6	PA Koto Baru	949.231.000	948.458.087	100	772.913
7	PA Lubuk Basung	925.683.000	925.202.777	100	480.223
8	PA Lubuk Sikaping	994.924.000	988.101.730	99	6.822.270
9	PA Maninjau	844.135.000	842.128.378	100	2.006.622
10	PA Muara Labuh	936.824.000	932.234.481	100	4.589.519
11	PA Padang Panjang	1.002.439.000	958.861.825	96	43.577.175
12	PA Painan	1.002.070.000	999.822.010	100	2.247.990
13	PA Payakumbuh	1.025.125.000	1.022.034.771	100	3.090.229
14	PA Sawahlunto	805.418.000	800.798.007	99	4.619.993
15	PA Sijunjung	1.034.183.000	1.032.139.333	100	2.043.667
16	PA Solok	920.794.000	886.284.329	96	34.509.671
17	PA Talu	911.704.000	911.580.834	100	123.166
18	PA Tanjung Pati	1.126.936.000	1.126.830.045	100	105.955
19	PA Pulau Punjung	929.444.000	929.034.218	100	409.782
Jumlah		21.601.372.000	21.477.949.788	99	123.422.212

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran PTA Padang dan PA se-Sumatera Barat Tahun 2025

## DIPA 01 BELANJA MODAL



Alokasi anggaran belanja modal untuk tahun anggaran 2025 di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang memperoleh pagu sebesar Rp.5.461.512.00. Pada tahun 2025 hanya Pengadilan Agama Maninjau yang tidak memiliki belanja modal.

Tabel 24. Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Satker	Pagu	Realisasi	(%) Realisasi	Sisa
1	PTA Padang	886.979.000	886.972.252	100	6.748
2	PA Padang	497.000.000	496.609.280	100	390.720
3	PA Batusangkar	480.740.000	479.306.497	100	1.433.503
4	PA Bukittinggi	181.350.000	178.073.970	98	3.276.030
5	PA Pariaman	140.202.000	137.148.280	98	3.053.720
6	PA Koto Baru	637.040.000	621.221.512	98	15.818.488
7	PA Lubuk Basung	87.750.000	87.747.900	100	2.100
8	PA Lubuk Sikaping	1.257.343.000	1.255.321.880	100	2.021.120
9	PA Maninjau	0	0	0	0
10	PA Muara Labuh	7.100.000	7.100.000	100	-
11	PA Padang Panjang	135.595.000	134.304.800	99	1.290.200
12	PA Painan	148.295.000	143.768.514	97	4.526.486
13	PA Payakumbuh	99.000.000	98.834.560	100	165.440
14	PA Sawahlunto	269.551.000	269.022.225	100	528.775
15	PA Sijunjung	50.000.000	48.499.996	97	1.500.004
16	PA Solok	15.000.000	15.000.000	100	-
17	PA Talu	366.000.000	357.808.500	98	8.191.500
18	PA Tanjung Pati	102.567.000	102.560.600	100	6.400
19	PA Pulau Punjung	100.000.000	99.000.000	99	1.000.000
Jumlah		5.461.512.000	5.418.300.766	99	43.211.234

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran PTA Padang dan PA se-Sumatera Barat Tahun 2025

# DIPA 04 (BADAN PERADILAN AGAMA)

## Peningkatan Manajemen Peradilan Agama



Tabel 25. Realisasi DIPA 04 (Badan Peradilan Agama)  
Tahun 2025 di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Satker	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa
			Jumlah	%	
1	PTA Padang	173,322,000	173,295,800	99.98	26,200
2	PA Padang	261,000,000	190,274,005	72.90	70,725,995
3	PA Batusangkar	80,100,000	75,225,000	93.91	4,875,000
4	PA Bukittinggi	114,720,000	112,200,000	97.80	2,520,000
5	PA Pariaman	119,270,000	118,231,100	99.13	1,038,900
6	PA Koto Baru	100,440,000	98,549,000	98.12	1,891,000
7	PA Lubuk Basung	115,000,000	110,193,000	95.82	4,807,000
8	PA Lubuk Sikaping	148,600,000	140,279,000	94.40	8,321,000
9	PA Maninjau	84,100,000	66,245,500	78.77	17,854,500
10	PA Muara Labuh	71,600,000	65,305,000	91.21	6,295,000
11	PA Padang Panjang	133,125,000	122,934,000	92.34	10,191,000
12	PA Painan	193,750,000	192,078,500	99.14	1,671,500
13	PA Payakumbuh	89,500,000	82,692,000	92.39	6,808,000
14	PA Sawahlunto	153,050,000	121,624,000	79.47	31,426,000
15	PA Sijunjung	115,000,000	107,849,000	93.78	7,151,000
16	PA Solok	92,700,000	86,555,000	93.37	6,145,000
17	PA Talu	284,950,000	251,798,500	88.37	33,151,500
18	PA Tanjung Pati	111,800,000	107,970,000	96.57	3,830,000
19	PA Pulau Punjung	71,275,000	66,964,000	93.95	4,311,000
Jumlah		2,513,302,000	2,290,262,405	91.13	223,039,595

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran PTA Padang dan PA se-Sumatera Barat Tahun 2025

Pada tahun 2025, Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat untuk DIPA 04 Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.2.513.302.000**. alokasi anggaran dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 mengalami perubahan pagu yang fluktuatif

Adapun Rincian Program Peningkatan manajemen Peradilan Agama terdiri atas belanja barang yang dipergunakan untuk peningkatan akses peradilan diantaranya pembebasan perkara, sidang keliling dan pos layanan hukum untuk para pencari keadilan.





# PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK



# PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)

Tabel 16. Realisasi PNBP DIPA 01 Tahun 2025  
PTA Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat

No	Satker	Estimasi	Realisasi	%
1	PTA Padang	5.387.000	4.232.050	78,56
2	PA Padang	0	7.815.150	∞
3	PA Batusangkar	0	1.008.000	∞
4	PA Bukittinggi	929.000	2.431.381	261,72
5	PA Pariaman	406.000	0	0
6	PA Koto Baru	0	0	0
7	PA Lubuk Basung	1.688.000	3.442.956	203,97
8	PA Lubuk Sikaping	462.000	3.912.645	846,89
9	PA Maninjau	0	2.291.800	∞
10	PA Muara Labuh	2.216.000	2.215.200	99,96
11	PA Padang Panjang	1.592.000	0	0,00
12	PA Painan	2.808.000	1.924.000	68,52
13	PA Payakumbuh	0	1.472.000	∞
14	PA Sawahlunto	0	0	0
15	PA Sijunjung	1.815.000	764.400	42,12
16	PA Solok	1.260.000	735.000	58,33
17	PA Talu	299.000	15.704.050	5.252,19
18	PA Tanjung Pati	0	2.237.000	∞
19	PA Pulau Punjung	73.000	0	0,0
Jumlah		18.935.000	50.185.632	265,04

Sumber: Laporan PNBP 2025

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk DIPA Badan Urusan Administrasi (01) untuk tahun 2025 sebesar **Rp.50.185.632**. Penerimaan tersebut melebihi **265,04%** dari estimasi pendapatan PNBP Tahun 2025 yang hanya sebesar **Rp.18.935.000**.



# PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DIPA 04 (DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA)

Tabel 26. Realisasi PNBP DIPA 01 Tahun 2025  
PTA Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat

No	Satker	Estimasi	Realisasi	(%) Realisasi
1	PTA Padang	740.000	910.000	122,97
2	PA Padang	156.833.000	195.685.500	124,77
3	PA Batusangkar	55.452.000	59.878.500	107,98
4	PA Bukittinggi	76.211.000	77.259.000	101,38
5	PA Pariaman	99.092.000	106.210.000	107,18
6	PA Koto Baru	42.656.000	63.155.000	148,06
7	PA Lubuk Basung	32.934.000	41.846.000	127,06
8	PA Lubuk Sikaping	36.604.000	47.800.500	130,59
9	PA Maninjau	15.560.000	16.375.000	105,24
10	PA Muara Labuh	28.190.000	44.545.500	158,02
11	PA Padang Panjang	29.939.000	32.049.500	107,05
12	PA Painan	75.066.000	94.147.000	125,42
13	PA Payakumbuh	65.461.000	83.381.000	127,38
14	PA Sawahlunto	17.523.000	16.160.500	92,22
15	PA Sijunjung	29.179.000	33.533.000	114,92
16	PA Solok	32.121.000	40.941.000	127,46
17	PA Talu	77.159.000	83.837.500	108,66
18	PA Tanjung Pati	40.826.000	54.337.000	133,09
19	PA Pulau Punjung	39.213.000	56.580.000	144,29
Jumlah		950.759.000	1.148.631.500	120,81

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk DIPA Badan Peradilan Agama (04) untuk tahun 2025 sebesar Rp.1.148.631.500. Penerimaan tersebut sebesar 120,81 persen dari Estimasi pendapatan PNBP Tahun 2025 yang hanya sebesar Rp.950.759.000.





## **PRESTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

# PRESTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Tabel 27. Prestasi Pengelolaan Keuangan di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025

No	Satker	Penghargaan	Instansi Pemberi	Keterangan
1	Pengadilan Tinggi Agama Padang	PTA Padang Raih Peringkat 2 Kategori Sedang Penyelesaian BMN	Biro Keuangan MA RI	Peringkat II
		Penghargaan atas keberhasilan 3 dari 38 satuan kerja di wilayah kerja Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam meraih nilai sempurna (100) pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2025.	DJPB Sumatera Barat	Penghargaan
2	Pengadilan Agama Batusangkar	PPSPM Capaian IKPA 100 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kategori Pagu Kecil (<20 Miliar) Semester I tahun 2025	KPPN Bukittinggi	Penghargaan
		Satuan Kerja (401948) mendapat nilai sempurna (100) pada Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Tahun 2025	KPPN Bukittinggi	Penghargaan
		Satuan Kerja (401947) mendapat nilai sempurna (100) pada Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Tahun 2025	KPPN Bukittinggi	Penghargaan
		Pejabat Pembuat Komitemen dari Implementasi Digipay Semester I Tahun 2025	KPPN Bukittinggi	Peringkat 2
		Kuasa Pengguna Anggaran Satker Implementasi Digipay Semester I Tahun 2025	KPPN Bukittinggi	Peringkat 2
4	Pengadilan Agama Pariaman	Pengelolaan Gaji Induk Terbaik 2025	KPPN Padang	Terbaik II
		Penyelesaian Rekonsiliasi Transaksi Data Keuangan dan Data BMN Koordinator Wilayah PTA Padang	PTA Padang	Terbaik I
		Capaian IKPA Terbaik TA 2024 Konversi 100%	PTA Padang	Terbaik II
		Capaian IKPA Terbaik TA 2024 Konversi 80%	PTA Padang	Terbaik II
5	Pengadilan Agama Lubuk Basung	Capaian IKPA 100 Semester I Tahun 2025 - Satuan Kerja 402613	KPPN Bukittinggi	Penghargaan
		Satuan Kerja mendapat nilai sempurna (100) pada Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Tahun 2025	Kanwil DjPb Sumatera Barat	Penghargaan
		Indikator Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang DIPA Badilag Tahun 2025 dengan Nilai 98.22	PTA Padang	Peringkat 3
		Indikator Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang DIPA BUA MA RI Tahun 2025 dengan Nilai 98.29	PTA Padang	Peringkat 5



# PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA



Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan yang berada di wilayah hukumnya terdiri atas tanah, gedung dan bangunan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud. Aset dimaksud merupakan sarana dan prasarana pengadilan yang dipergunakan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Adapun golongan dan nilai Barang Milik Negara yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan yang berada di wilayah hukumnya pada tahun anggaran 2025 dapat digambarkan pada tabel di bawah ini

## INVENTARISASI KEKAYAAN NEGARA



Tabel 27. Prestasi Pengelolaan Keuangan di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025

No	Golongan Barang	Nilai (Rp)		
		2023	2024	2025
1	Tanah	93.775.151.212	91.882.302.962	94.951.712.212
2	Peralatan dan Mesin	46.407.253.393	45.593.879.562	49.434.431.002
3	Gedung dan Bangunan	136.739.452.327	135.587.273.077	170.133.560.256
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	337.876.470	258.157.470	0
5	Aset Tetap Lainnya	748.465.167	686.004.007	753.020.766
6	Aset Tak Berwujud	82.436.440	52.586.440	49.638.220
<b>TOTAL</b>		<b>268.912.237.247</b>	<b>278.090.635.009</b>	<b>315.322.362.456</b>



Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI untuk digunakan dalam pelayanan publik.

Nilai tanah Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat untuk Tahun Anggaran 2023, 2024 dan 2025



Tabel 28. Nilai Aset Tanah Tahun 2025  
di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Satker	Nilai (Rp)		
		2023	2024	2025
1	PTA. Padang	14.038.111.000	14.038.111.000	14.038.111.000
2	PA. Padang	7.574.063.000	7.574.063.000	7.574.063.000
3	PA. Batusangkar	2.911.762.000	2,911,762,000	2,911,762,000
4	PA. Bukittinggi	2.291.822.300	2.291.822.300	2.291.822.300
5	PA. Pariaman	2.877.958.662	2.877.958.662	2.877.958.662
6	PA. Koto Baru	6.105.315.000	6.105.315.000	6.105.315.000
7	PA. Lubuk Basung	9.809.353.000	9.809.353.000	9.809.353.000
8	PA. Lubuk Sikaping	5.010.105.000	5.010.105.000	5.010.105.000
9	PA. Maninjau	2.637.000.000	2.637.000.000	2.637.000.000
10	PA. Muara Labuh	3.187.260.000	4.515.631.000	4.515.631.000
11	PA. Padang Panjang	7.652.500.000	7.652.500.000	7.652.500.000
12	PA. Painan	954.182.000	954.182.000	954.182.000
13	PA. Payakumbuh	5.984.628.000	5.984.628.000	5.984.628.000
14	PA. Sawahlunto	3.206.396.250	3.206.396.250	3.206.396.250
15	PA. Sijunjung	1.340.863.000	1.340.863.000	1.340.863.000
16	PA. Solok	10.339.268.000	10.339.268.000	10.339.268.000
17	PA. Talu	1.863.461.000	1.711.651.000	1.711.651.000
18	PA. Tanjung Pati	5.153.603.000	5.153.603.000	5.153.603.000
19	PA. Pulau Punjung	837.500.000	837.500.000	837.500.000
Total		93.775.151.212	91.882.302.962	94.951.712.212

# PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin yang selama ini digunakan dalam mendukung kegiatan pelayanan publik. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam peralatan dan mesin ini mencakup antara lain: alat angkutan, alat kantor dan alat rumah tangga, alat studio, alat komunikasi, alat pemancar, alat pengolah data, alat keselamatan kerja, dan alat peraga. Nilai peralatan dan Mesin TA. 2022, 2023 dan 2024 dapat dirinci sebagaimana berikut:

Tabel 29. Nilai Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2025  
di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Satker	Nilai (Rp)		
		2023	2024	2025
1	PTA. Padang	4.853.683.756	2.622.129.218	3.797.323.320
2	PA Padang	3.230.010.001	3.327.299.749	3.728.575.405
3	PA Pariaman	3.078.282.151	3.115.782.151	2.994.677.455
4	PA Batusangkar	2.367.636.213	2.603.536.213	2.396.843.056
5	PA Bukittinggi	2.115.756.323	2.174.548.823	2.836.966.715
6	PA Payakumbuh	2.148.674.000	2.269.217.500	2.198.830.479
7	PA Sawahlunto	2.312.055.230	2.349.555.230	2.134.688.321
8	PA Solok	2.662.557.992	2.700.057.992	2.503.934.239
9	PA Padang Panjang	2.584.629.218	2.622.129.218	2.621.557.467
10	PA Muara Labuh	1.793.297.699	1.620.098.548	2.069.831.108
11	PA Sijunjung	1.831.022.753	1.841.179.553	1.924.254.250
12	PA Koto Baru	2.165.094.207	2.201.855.007	2.373.235.545
13	PA Painan	2.312.716.641	2.350.216.641	2.407.260.508
14	PA Lubuk Sikaping	2.439.562.495	2.439.562.495	2.324.523.292
15	PA Talu	2.159.042.889	2.159.894.889	2.393.915.135
16	PA Maninjau	2.543.273.937	2.583.273.937	2.808.065.594
17	PA Tanjung Pati	2.074.416.420	2.111.916.420	2.149.842.486
18	PA Lubuk Basung	2.805.071.878	2.842.504.378	2.983.046.846
19	PA Pulau Punjung	930.469.590	1.659.121.600	2.787.049.781
Total		46.407.253.393	45.593.879.562	49.434.431.002



## KENDARAAN DINAS

Tabel 30. Matriks Kondisi Kendaraan Dinas Tahun 2025  
PTA Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat

No	Satker	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi		
				B	RR	RB
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	PTA Padang	TOYOTA ALTIS	2008	✓		
		TOYOTA VIOS	2012	✓		
		TOYOTA COROLLA ALTIS	2004	✓		
		TOYOTA	2004	✓		
		KIJANG INNOVA	2009	✓		
		TOYOTA AVANZA S	2011	✓		
		TOYOTA RUSH	2011	✓		
2	PA Pariaman	TOYOTA KIJANG INNOVA	2009		✓	
		TOYOTA AVANZA	2015		✓	
		TOYOTA MITSUBISHI XPANDER	2023	✓		
3	PA Solok	TOYOTA KIJANG	2009	✓		
		SUZUKI	2014	✓		
4	PA Sawahlunto	TOYOTA KIJANG INNOVA	2006		✓	
		SUZUKI APV	2011		✓	
5	PA Pulau Punjung	DAIHATSU ALL NEW TERIOS AT	2019	✓		
		TOYOTA INNOVA 2.0 GM/T	2023	✓		
6	PA Batusangkar	ALTIS	2005	✓		
		TOYOTA	2006	✓		



No	Satker	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi		
				B	RR	RB
7	PA Padang	TOYOTA VIOS	2008		✓	
		TOYOTA	2009		✓	
		SUZUKI	2011	✓		
8	PA Padang Panjang	TOYOTA	2006		✓	
9	PA Sijunjung	KIJANG INNOVA	2008	✓		
		DAIHATSU TERIOS	2015	✓		
10	PA Koto Baru	KIJANG INNOVA	2009	✓		
11	PA Muara Labuh	KIJANG INNOVA	2020	✓		
		KIJANG INNOVA	2008	✓		
12	PA Painan	KIJANG INNOVA	2008	✓		
		SUZUKI APV	2014	✓		
		SUZUKI	2014	✓		
13	PA Bukittinggi	STATION WAGON	2010	✓		
		SEDAN	2006	✓		
		STATION WAGON	2015	✓		
14	PA Talu	INNOVA	2008	✓		
		INNOVA	2020	✓		
15	PA Maninjau	FORD	2011		✓	
		INNOVA	2012		✓	



No	Satker	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi		
				B	RR	RB
16	PA Payakumbuh	STATION WAGON	2014	✓		
		STATION WAGON	2005	✓		
17	PA Tanjung Pati	KIJANG INNOVA	2009	✓		
18	PA Lubuk Basung	KIJANG INNOVA	2009	✓		
		KIJANG INNOVA	2020	✓		
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	PTA Padang	YAMAHA	2004	✓		
		HONDA	2005	✓		
		HONDA	2005	✓		
		HONDA	2007	✓		
2	PA Pariaman	HOONDA SUPRA 125	2005			✓
		HONDA REVO	2007			✓
		HONDA REVO NF.100/TD	2008			✓
		HONDA REVO NF.100/TD	2008			✓
		HONDA REVO NF.100/TD	2008			✓
3	PA Solok	HONDA	2003	✓		
		HONDA	2005	✓		
		HONDA	2007	✓		
		HONDA	2008	✓		
		HONDA	2008	✓		



No	Satker	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi		
				B	RR	RB
II Jenis Kendaraan Roda 2						
4	PA Sawahlunto	HONDA GL MAX	1997			✓
		HONDA SUPRA X	2005		✓	
		HONDA MEGA PRO	2005		✓	
		HONDA SUPRA X 125 R	2008		✓	
		HONDA SUPRA X 125 R	2008		✓	
		HONDA SUPRA X 125 R	2008		✓	
5	PA Pulau Punjung	YAMAHA AEROX	2019	✓		
		YAMAHA ALL NEW VIXION VIN 2018	2019	✓		
6	PA Batusangkar	HONDA	2006		✓	
		HONDA	2007		✓	
		HONDA	2008	✓		
		HONDA	2008	✓		
7	PA Padang	HONDA	2006	✓		
		HONDA	2007	✓		
		HONDA	2008	✓		
		HONDA	2008	✓		
		HONDA	2008	✓		
		YAMAHA	2018	✓		



No	Satker	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi		
				B	RR	RB
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
8	PA Padang Panjang	HONDA	2006	✓		
		HONDA	2007	✓		
		HONDA NEW MEGA PRO	2008	✓		
		HONDA NEW MEGA PRO	2008	✓		
9	PA Sijunjung	HONDA	2006	✓		
		HONDA	2007	✓		
		HONDA NEW MEGA PRO	2008	✓		
		HONDA NEW MEGA PRO	2008	✓		
		HONDA	2006	✓		
		HONDA	2007	✓		
		HONDA	2008	✓		
10	PA Kotobaru	HONDA/NF 125 SD	2005		✓	
		HONDA	2007		✓	
		HONDA	2008		✓	
		HONDA	2008		✓	
		HONDA	2008		✓	
11	PA Muara Labuh	HONDA NF 125 SD	2005		✓	
		HONDA NF 125 SD	2007		✓	
		HONDA CS1241RR	2008		✓	
		HONDA SUPRA X 125	2008	✓		
		HONDA MEGA PRO	2008	✓		



No	Satker	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi		
				B	RR	RB
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
12	PA Bukittinggi	HONDA	2006			✓
		HONDA	2007			✓
		HONDA NF 125 TR	2008	✓		
		HONDA NF 125 TR	2008	✓		
		HONDA NF 125 TRF	2008	✓		
		HONDA NF 125 TRF	2008	✓		
		Honda 160 D	2008	✓		
13	PA Lubuk Sikaping	Honda GL M II	2005	✓		
		Supra X 125	2007	✓		
		Honda Mega Pro	2008	✓		
		Honda Mega Pro	2008	✓		
		Honda Mega Pro	2008	✓		
		Honda New Supra X125	2008	✓		
14	PA Talu	Honda GL.160.CW	2008	✓		
		Honda Supra	2008	✓		
		Honda Mega Pro	2007	✓		
		Honda Supra	2005		✓	
		Honda GLM	1997		✓	
		Suzuki	1981			✓



No	Satker	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi		
				B	RR	RB
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
15	PA Maninjau	GL Max	1997		✓	
		Honda NF 125 SD	2006	✓		
		Honda NF 125 SF (PGM F1)	2007	✓		
		Honda Supra X 125 R Racing Spirit	2008	✓		
		Honda Supra X 125 R Racing Spirit	2008	✓		
		Honda Mega Pro 1600	2008	✓		
16	PA Payakumbuh	Honda NF 125 TR	2005	✓		
		Honda NF 125 TR	2007	✓		
		Honda NF 125 TR	2008	✓		
		Honda NF 125 TR	2008	✓		
		Honda NF 125 TRF	2008	✓		
17	PA Tanjung Pati	Honda NF 125 TR	2008		✓	
		Honda NF 125 TR	2008		✓	
18	PA Lubuk Basung	Honda Supra X 125	2005		✓	
		Honda Supra X	2007		✓	
		New Supra X125 CW	2008		✓	
		New Supra X125 CW	2008		✓	
		New Supra X125 CW	2008		✓	
		New Supra X125 CW	2008		✓	
		Honda Fit X	2008		✓	
		Honda Fit X	2008		✓	

# GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan yang dimaksud adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI yang selama ini digunakan dalam mendukung kegiatan pelayanan publik. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam gedung dan bangunan ini mencakup antara lain gedung kantor dan bangunan rumah negara. Nilai gedung dan bangunan TA. 2022, 2023 dan 2024 dapat dirinci sebagaimana berikut:

Tabel 31. Nilai Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2025  
PTA Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat

No	Satker	Nilai (Rp)		
		2023	2024	2025
1	PTA Padang	10.034.365.500	10.034.365.500	9.690.484.052
2	PA Padang	11.057.954.809	11.057.954.809	11.384.854.809
3	PA Batusangkar	6.664.229.000	6.664.229.000	7.063.009.898
4	PA Bukittinggi	13.690.388.000	13.690.388.000	14.641.297.859
5	PA Pariaman	16.704.980.766	16.734.980.766	16.296.307.766
6	PA Koto Baru	12.690.190.250	13.193.620.250	13.502.778.763
7	PA Lubuk Basung	4.532.679.410	4.532.679.410	4.629.644.067
8	PA Lubuk Sikaping	7.461.540.142	7.461.540.142	8.560.925.172
9	PA Maninjau	4.522.242.000	4.522.242.000	4.292.914.000
10	PA Muara Labuh	2.917.013.000	4.367.214.000	3.906.288.000
11	PA Padang Panjang	2.835.182.000	2.835.182.000	2.696.048.168
12	PA Painan	2.197.400.000	2.197.400.000	3.032.448.462
13	PA Payakumbuh	10.635.390.900	10.635.390.900	10.857.113.132
14	PA Sawahlunto	8.642.416.250	5.667.382.000	5.667.382.000
15	PA Sijunjung	4.662.878.000	4.662.878.000	4.425.027.763
16	PA Solok	5.712.398.000	5.862.398.000	5.464.454.304
17	PA Talu	2.449.422.000	2.138.646.000	2.128.011.000
18	PA Tanjung Pati	9.328.782.300	9.328.782.300	11.256.017.200
19	PA Pulau Punjung	0	0	27.239.011.366
Total		132.190.814.777	136.739.452.327	166.876.661.718

# RUMAH DINAS DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Tabel 32. Kondisi Rumah Dinas Tahun 2025  
di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Satker	Uraian	Jumlah	Kondisi		
				B	RR	RB
1	PTA Padang	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	1	✓		
		Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	1	✓		
		Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	1	✓		
2	PA Pariaman	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1			✓
3	PA Solok	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	1	✓		
4	PA Padang Panjang	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	1			✓
5	PA Sijunjung	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	1	✓		
6	PA Koto Baru	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	1			✓
7	PA Muara Labuh	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	1	✓		
		Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1			✓
8	PA Painan	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	1	✓		
9	PA Bukittinggi	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	1	✓		
10	PA Lubuk Sikaping	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	1	✓		
11	PA Talu	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1			✓
12	PA Lubuk Basung	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	1		✓	

# ASET TETAP LAINNYA

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, tetapi memenuhi defenisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini terdiri atas: koreksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni, budaya dan olah raga. Nilai aset tetap lainnya TA. 2023, 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 33. Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2025  
di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Satker	Nilai (Rp)		
		2023	2024	2025
1	PTA Padang	86.247.765	86.604.974	89.632.789
2	PA Padang	59.751.626	59.751.626	60.108.835
3	PA Batusangkar	3.676.728	4.033.937	4.033.937
4	PA Bukittinggi	13.461.360	13.690.569	13.818.569
5	PA Pariaman	8.834.640	9.191.849	9.191.849
6	PA Koto Baru	36.328.040	36.328.040	36.685.249
7	PA Lubuk Basung	26.132.240	26.489.449	26.489.449
8	PA Lubuk Sikaping	16.677.338	16.867.338	17.034.547
9	PA Maninjau	85.070.728	85.427.937	85.427.937
10	PA Muara Labuh	154.079.940	154.437.149	154.437.149
11	PA Padang Panjang	46.646.640	46.646.640	47.003.849
12	PA Painan	64.052.090	64.409.299	64.409.299
13	PA Payakumbuh	15.827.968	16.017.968	16.185.177
14	PA Sawahlunto	12.386.638	12.386.638	12.743.847
15	PA Sijunjung	22.266.640	22.623.849	22.623.849
16	PA Solok	24.553.290	24.910.499	24.910.499
17	PA Talu	66.642.409	0	66.999.618
18	PA Tanjung Pati	5.829.037	6.186.246	927.109
19	PA Pulau Punjung	-	-	357.209
Total		748.465.117	686.004.007	753.020.766

# ASET TAK BERWUJUD

Aset tak berwujud merupakan aset non moneter yang bisa di identifikasi, tidak memiliki wujud fisik secara nyata. Aset tak berwujud yang dimiliki oleh PTA Padang dan Pengadilan yang berada di bawahnya terdiri atas: software, aplikasi dan website.

Tabel 34. Nilai Aset Tak Berwujud Tahun 2025 di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Satker	Nilai (Rp)		
		2023	2024	2025
1	PTA Padang	15.838.220	15.838.220	15.838.220
2	PA Padang	4.948.220	4.948.220	
3	PA Pariaman	5.000.000	5.000.000	33.800.000
4	PA Padang Panjang	26.800.000	26.800.000	26.800.000
5	PA Painan	6.050.000	0	0
Total		58.636.440	52.586.440	49.638.220

Sumber: Laporan SIMAK-BMN Korwil PTA Padang

## ASET TAK BERWUJUD

### PTA Padang

- Website pta-padang.go.id Rp.5.500.000,-
- Aplikasi Pustaka Rp.5.390.000,-
- Antivirus Rp.4.948.220,-

### PA Pariaman

- Anti virus Rp. 5.000.000,-
- Aplikasi SIADPA Rp. 20.750.000
- Aplikasi Touchschreen Rp. 2.000.000
- Website Rp. 6.050.000,-

### PA Padang Panjang

- Aplikasi SIADPA Rp.20.750.000,-
- Website Rp.6.050.000,-

# MATRIKS SARANA DAN PRASARANA DI PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Tabel 35. Matriks Sarana dan Prasarana di Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	*Keterangan
I	Sarana/Prasarana Gedung		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Panitera Muda Hukum	1	
7	Ruang Panitera Muda Banding	1	
8	Ruang Kabbag Umum dan Keuangan	1	
9	Ruang Kabbag Perencanaan dan Kepegawaian	1	
10	Ruang Panitera Pengganti	1	
11	Ruang Kesekretariatan	1	
12	Ruang Sidang	1	
13	Ruang IT/Server	1	
14	Ruang Rapat Pimpinan	1	
15	Ruang Kasubag Kepegawaian dan TI	1	
16	Ruang Kasubag TU dan RT	1	
17	Ruang Kasubag Perencanaan dan Anggaran	1	
18	Ruang Kasubag Keuangan dan Pelaporan	1	
19	Ruang Bendahara	1	
20	Ruang Perpustakaan	1	
21	Ruang Arsip Perkara	1	
22	Ruang Arsip Kesekretariatan	1	
23	Ruang Aula	1	
24	Dapur	1	
25	Toilet	4	
26	Lobi Lantai I	1	
27	Lobi Lantai II	1	
28	Gudang	1	
29	Ruang Power House Genset	1	
30	Ruang Power House Pompa Air	1	
31	Ruang Laktasi	1	
32	Rumah Dinas	3	

# MATRIKS SARANA DAN PRASARANA DI PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Tabel 35. Matriks Sarana dan Prasarana di Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	*Keterangan
II	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Tanah Rumah Dinas	2.409 M	
2	Tanah Bangunan Kantor	5.992 M	
3	Mobil Sedan	3	
4	Mobil Minibus	4	
5	Sepeda Motor	4	
6	Mesin Ketik Manual	2	
7	Lemari Besi/Metal	10	
8	Lemari Kayu	36	
9	Rak Besi	2	
10	Rak Kayu	23	
11	Filing Kabinet	19	
12	Brankas	2	
13	CCTV	21	
14	Papan Visual/Papan Nama	21	
15	Mesin Absensi	1	
16	Headmachine Besar	1	
17	Hand Metal Detector	1	
18	Infokus	7	
19	Layar Infocus	4	
20	Teralis	1	
21	Meja Kerja Kayu	102	
22	Kursi Besi/Metal	328	
23	Sice	20	
24	Meja Rapat	2	
25	Tempat Tidur Kayu	6	
26	Water filter	1	
27	Meja Resepsiionis	1	
28	Spring Bed	5	
29	Meja Makan Kayu	3	
30	Meubelair Lainnya	1	

# MATRIKS SARANA DAN PRASARANA DI PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Tabel 35. Matriks Sarana dan Prasarana di Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	*Keterangan
31	Lemari Es	3	
32	AC Cassete	3	
33	AC Split	39	
34	Kipas Angin	3	
35	Exhaust Fan	4	
36	Kompor Gas	1	
37	Tabung Gas	1	
38	Televisi	8	
39	Lambang Garuda Pancasila	1	
40	Tiang Bendera	8	
41	Tangga Alumunium	2	
42	Mimbar/Podium	1	
43	Palu Sidang	2	
44	Lambang Instansi	1	
45	Karpet	1	
46	Vertical Blind	4	
47	UPS	7	
48	Video Tape Recorder Sationer	2	
49	Camera Digital	2	
50	Theodolite	1	
51	Telephone (PABX)	1	
52	Pesawat Telepon	53	
53	Unit Tranceiver VHT Portable	1	
54	Unit Tranceiver VHT Transpotable	4	
55	Antene Vhf/fm Stationary	1	
56	Swicer/Menara Antena Lainnya	1	
57	Genset	2	
58	P.C Unit	22	
59	Laptop	35	
60	Printer	20	

# MATRIKS SARANA DAN PRASARANA DI PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Tabel 35. Matriks Sarana dan Prasarana di Pengadilan Tinggi Agama Padang

61	Scanner	4	
62	Server	2	
63	Router	1	
64	Rak Server	1	
65	Bracket Standing Peralatan	1	
66	Kamera Udara	1	
67	Bangunan Gedung Kantor	1	
68	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	1	
69	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	
70	Gedung Pos Jaga	2	
71	Taman Permanen	2	
72	Rumah Negara Gol.II Tipe A Permanen	1	
73	Rumah Negara Gol.II Tipe B Permanen		
74	Pagar Permanen	2	
75	Sumur Artesis	1	
76	Monografi	1385	
77	Software Komputer	3	



## Informasi Lain ?

Sistem Informasi Tata Persuratan (SiSuTan) Versi 2  
Pengadilan Tinggi Agama Padang

DETAIL



Sign in

nur

...

LOGIN

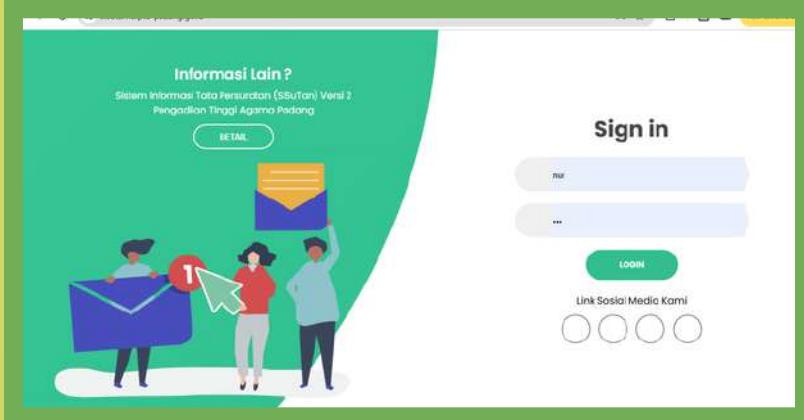
Link Sosial Media Kami



# PENGELOLAAN TATA USAHA RUMAH TANGGA (TURT)



# PENGELOLAAN TATA PERSURATAN DINAS



Penerimaan surat masuk dalam tahun 2025 pada Pengadilan Tinggi Agama Padang melalui Aplikasi Si Sutan berjumlah **1.000** surat. Sedangkan Keadaan surat keluar dalam tahun 2025 pada Pengadilan Tinggi Agama Padang berjumlah **3.287** surat. Berikut rekap daftar per klasifikasi surat masuk dan surat keluar pada tahun 2025

Tabel 36. Daftar Jumlah Surat Masuk Tahun 2025  
Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Jenis	Jumlah
1	DL	65
2	HK	40
3	HM	192
4	KA	15
5	KP	288
6	KU	40
7	OT	88
8	PL	79
9	PS	6
10	PW	51
11	RA	52
12	RT	7
13	TI	57
<b>Jumlah</b>		<b>1.000</b>

Tabel 37. Daftar Jumlah Surat Keluar Tahun 2025  
Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Jenis	Jumlah
1	DL	131
2	HK	122
3	HM	91
4	KA	41
5	KP	1721
6	KU	455
7	OT	268
8	PL	231
9	PS	4
10	PW	49
11	RA	94
12	RT	46
13	TI	33
14	DLL	1
<b>Jumlah</b>		<b>3.287</b>

## PENGIRIMAN SURAT KELUAR MELALUI POS/JNE/JNT



Selama Tahun 2025, Pengadilan Tinggi Agama Padang telah melakukan pengiriman sejumlah dokumen resmi melalui layanan pos tercatat dan ekspedisi lainnya kepada satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang maupun instansi terkait lainnya. Adapun jumlah pengiriman surat melalui pos pada tahun 2025 yaitu **150** surat.

# PENGELOLAAN KEARSIPAN

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1436/SEK/KA2/X/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya, maka pengelolaan arsip di Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2025 telah mengacu kepada aturan tersebut.

Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Unit Kearsipan II (Pengadilan Tingkat Banding) meliputi berbagai kegiatan yang mencakup Pengelolaan Arsip Inaktif, Alihmedia dan Pengelolaan Arsip Elektronik, Pengelolaan Arsip Vital (Penyelesaian Perkara), Penyusutan Arsip dan Pembinaan Kearsipan.



## PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF

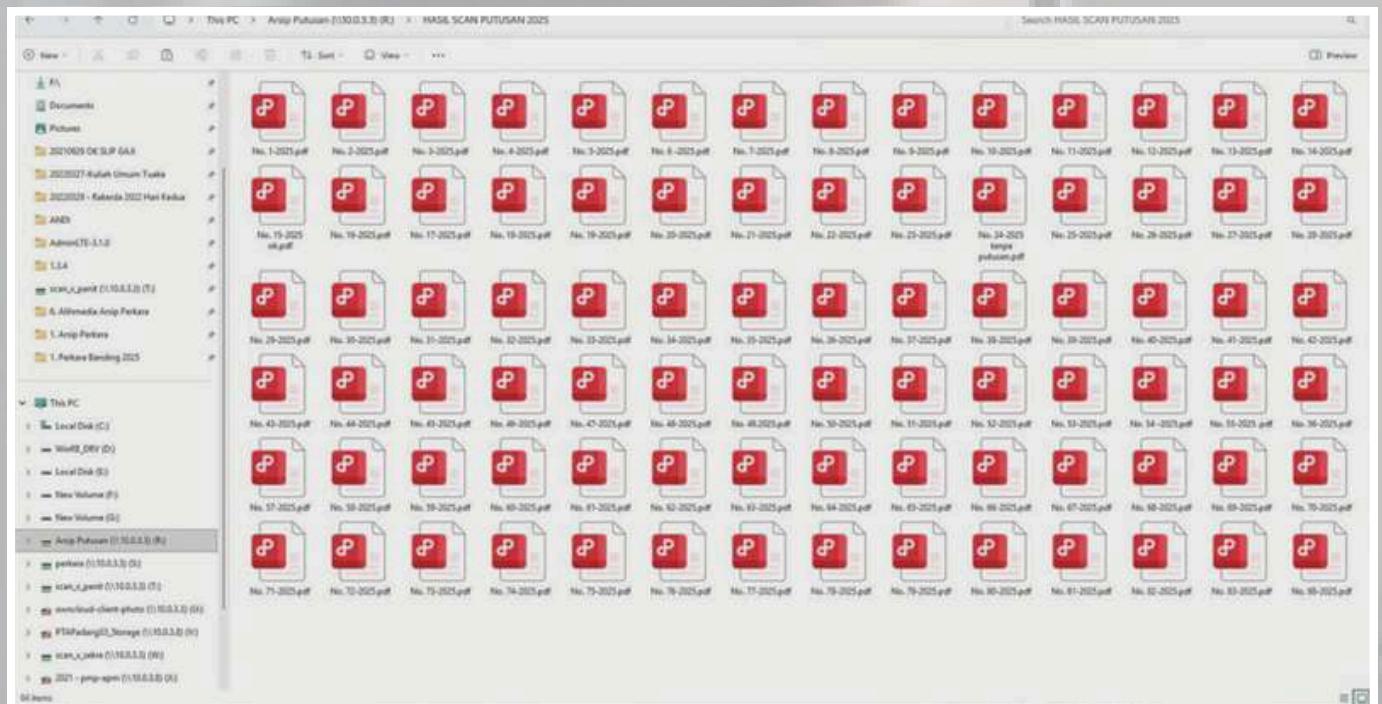
Pengelolaan Arsip Inaktif atau arsip yang sudah berkurang nilai gunanya berdasarkan jadwal retensi retensi arsip di Pengadilan Tinggi Agama Padang bertujuan untuk menjaga agar arsip yang disimpan dapat ditemukan kembali dengan cepat, tepat serta dengan biaya yang seefisien mungkin. Pengelolaan Arsip Inaktif Pengadilan Tinggi Agama Padang dilakukan pada bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Arsip inaktif yang tersimpan di Ruang Arsip Kepaniteraan berjumlah **206** berkas yang berasal dari Kepaniteraan Muda Hukum dan Kepaniteraan Muda Banding. Sementara itu, arsip inaktif yang tersimpan di Ruang Arsip Kesekretariatan berjumlah **1.105** berkas yang berasal dari masing-masing subbagian di Pengadilan Tinggi Agama Padang, yaitu Subbagian Keuangan dan Pelaporan, Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, serta Subbagian Rencana Program dan Anggaran.



# ALIH MEDIA ARSIP DAN ARSIP ELEKTRONIK

Alih media arsip pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dilakukan terhadap arsip yang berbentuk kertas ke bentuk elektronik. Arsip berkas perkara dialihmediakan melalui pemindaian/scanning arsip dengan format pdf yang nantinya disimpan pada server serta diinput ke dalam SIPP tingkat banding. Dalam tahun 2025, jumlah arsip perkara yang telah dialihmediakan dan diinput ke SIPP sebanyak **84** arsip berkas perkara.



No	Nomor Surat	Nomor Tanda	Nomor Surat Tanda	Nomor Pengajuan	Nomor	Nomor Surat	Nomor Surat	Tanggal Surat	Status Surat	File di SIPP	
										Surat	Surat
1	1	1	1	1	1	1	1	14-Nov-2025	Surat		
2	2	2	2	2	2	2	2	15-Nov-2025	Surat		
3	3	3	3	3	3	3	3	16-Nov-2025	Surat		
4	4	4	4	4	4	4	4	17-Nov-2025	Surat		
5	5	5	5	5	5	5	5	18-Nov-2025	Surat		
6	6	6	6	6	6	6	6	19-Nov-2025	Surat		
7	7	7	7	7	7	7	7	20-Nov-2025	Surat		
8	8	8	8	8	8	8	8	21-Nov-2025	Surat		
9	9	9	9	9	9	9	9	22-Nov-2025	Surat		
10	10	10	10	10	10	10	10	23-Nov-2025	Surat		
11	11	11	11	11	11	11	11	24-Nov-2025	Surat		
12	12	12	12	12	12	12	12	25-Nov-2025	Surat		
13	13	13	13	13	13	13	13	26-Nov-2025	Surat		
14	14	14	14	14	14	14	14	27-Nov-2025	Surat		
15	15	15	15	15	15	15	15	28-Nov-2025	Surat		
16	16	16	16	16	16	16	16	29-Nov-2025	Surat		
17	17	17	17	17	17	17	17	30-Nov-2025	Surat		
18	18	18	18	18	18	18	18	31-Nov-2025	Surat		
19	19	19	19	19	19	19	19	01-Dec-2025	Surat		
20	20	20	20	20	20	20	20	02-Dec-2025	Surat		
21	21	21	21	21	21	21	21	03-Dec-2025	Surat		
22	22	22	22	22	22	22	22	04-Dec-2025	Surat		
23	23	23	23	23	23	23	23	05-Dec-2025	Surat		
24	24	24	24	24	24	24	24	06-Dec-2025	Surat		
25	25	25	25	25	25	25	25	07-Dec-2025	Surat		
26	26	26	26	26	26	26	26	08-Dec-2025	Surat		
27	27	27	27	27	27	27	27	09-Dec-2025	Surat		
28	28	28	28	28	28	28	28	10-Dec-2025	Surat		
29	29	29	29	29	29	29	29	11-Dec-2025	Surat		
30	30	30	30	30	30	30	30	12-Dec-2025	Surat		
31	31	31	31	31	31	31	31	13-Dec-2025	Surat		
32	32	32	32	32	32	32	32	14-Dec-2025	Surat		
33	33	33	33	33	33	33	33	15-Dec-2025	Surat		
34	34	34	34	34	34	34	34	16-Dec-2025	Surat		
35	35	35	35	35	35	35	35	17-Dec-2025	Surat		
36	36	36	36	36	36	36	36	18-Dec-2025	Surat		
37	37	37	37	37	37	37	37	19-Dec-2025	Surat		
38	38	38	38	38	38	38	38	20-Dec-2025	Surat		
39	39	39	39	39	39	39	39	21-Dec-2025	Surat		
40	40	40	40	40	40	40	40	22-Dec-2025	Surat		
41	41	41	41	41	41	41	41	23-Dec-2025	Surat		
42	42	42	42	42	42	42	42	24-Dec-2025	Surat		
43	43	43	43	43	43	43	43	25-Dec-2025	Surat		
44	44	44	44	44	44	44	44	26-Dec-2025	Surat		
45	45	45	45	45	45	45	45	27-Dec-2025	Surat		
46	46	46	46	46	46	46	46	28-Dec-2025	Surat		
47	47	47	47	47	47	47	47	29-Dec-2025	Surat		
48	48	48	48	48	48	48	48	30-Dec-2025	Surat		
49	49	49	49	49	49	49	49	31-Dec-2025	Surat		
50	50	50	50	50	50	50	50	01-Jan-2026	Surat		
51	51	51	51	51	51	51	51	02-Jan-2026	Surat		
52	52	52	52	52	52	52	52	03-Jan-2026	Surat		
53	53	53	53	53	53	53	53	04-Jan-2026	Surat		
54	54	54	54	54	54	54	54	05-Jan-2026	Surat		
55	55	55	55	55	55	55	55	06-Jan-2026	Surat		
56	56	56	56	56	56	56	56	07-Jan-2026	Surat		
57	57	57	57	57	57	57	57	08-Jan-2026	Surat		
58	58	58	58	58	58	58	58	09-Jan-2026	Surat		
59	59	59	59	59	59	59	59	10-Jan-2026	Surat		
60	60	60	60	60	60	60	60	11-Jan-2026	Surat		
61	61	61	61	61	61	61	61	12-Jan-2026	Surat		
62	62	62	62	62	62	62	62	13-Jan-2026	Surat		
63	63	63	63	63	63	63	63	14-Jan-2026	Surat		
64	64	64	64	64	64	64	64	15-Jan-2026	Surat		
65	65	65	65	65	65	65	65	16-Jan-2026	Surat		
66	66	66	66	66	66	66	66	17-Jan-2026	Surat		
67	67	67	67	67	67	67	67	18-Jan-2026	Surat		
68	68	68	68	68	68	68	68	19-Jan-2026	Surat		
69	69	69	69	69	69	69	69	20-Jan-2026	Surat		
70	70	70	70	70	70	70	70	21-Jan-2026	Surat		
71	71	71	71	71	71	71	71	22-Jan-2026	Surat		
72	72	72	72	72	72	72	72	23-Jan-2026	Surat		
73	73	73	73	73	73	73	73	24-Jan-2026	Surat		
74	74	74	74	74	74	74	74	25-Jan-2026	Surat		
75	75	75	75	75	75	75	75	26-Jan-2026	Surat		
76	76	76	76	76	76	76	76	27-Jan-2026	Surat		
77	77	77	77	77	77	77	77	28-Jan-2026	Surat		
78	78	78	78	78	78	78	78	29-Jan-2026	Surat		
79	79	79	79	79	79	79	79	30-Jan-2026	Surat		
80	80	80	80	80	80	80	80	31-Jan-2026	Surat		
81	81	81	81	81	81	81	81	01-Feb-2026	Surat		
82	82	82	82	82	82	82	82	02-Feb-2026	Surat		
83	83	83	83	83	83	83	83	03-Feb-2026	Surat		
84	84	84	84	84	84	84	84	04-Feb-2026	Surat		

## PENGELOLAAN ARSIP VITAL



Berdasarkan hasil identifikasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta jenis arsip yang dihasilkan pada unit pengolah, salah satu jenis arsip vital yang terdapat di Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah arsip perkara. Total arsip perkara yang tersimpan pada Ruang Arsip Kepaniteraan berjumlah **1.660** berkas arsip perkara dalam kurun waktu 1991 s.d. 2025. Kegiatan penyimpanan dan penataan arsip perkara berpedoman pada Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Pola Bindalmin) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan dalam rangka mendukung tertib administrasi serta kemudahan akses arsip perkara, Pengadilan Tinggi Agama Padang juga melaksanakan digitalisasi arsip perkara. Digitalisasi arsip perkara tersebut dapat diakses melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Adapun rincian berkas arsip perkara adalah sebagai berikut



Tabel 30. Daftar Jumlah Arsip Perkara Yang Tersimpan (Tahun 1991 s.d. 2025)

Tahun	Jumlah Arsip Perkara
1991-2000	388 berkas
2001-2010	434 berkas
2011-2020	484 berkas
2021-2025	354 berkas
<b>Total</b>	<b>1.660 berkas</b>

# PENYUSUTAN ARSIP

Kegiatan pemindahan arsip di Pengadilan Tinggi Agama Padang dilakukan terhadap arsip inaktif dengan berdasarkan jangka waktu simpan dalam jadwal retensi arsip. Arsip dipindahkan dari masing-masing unit pengolah ke dalam Ruang Arsip dengan dilampirkan Berita Acara Pemindahan Arsip beserta Daftar Arsip yang Dipindahkan. Berikut rekap pemindahan arsip di tahun 2025 pada masing-masing sub bagian dapat di lihat pada tabel berikut ini.

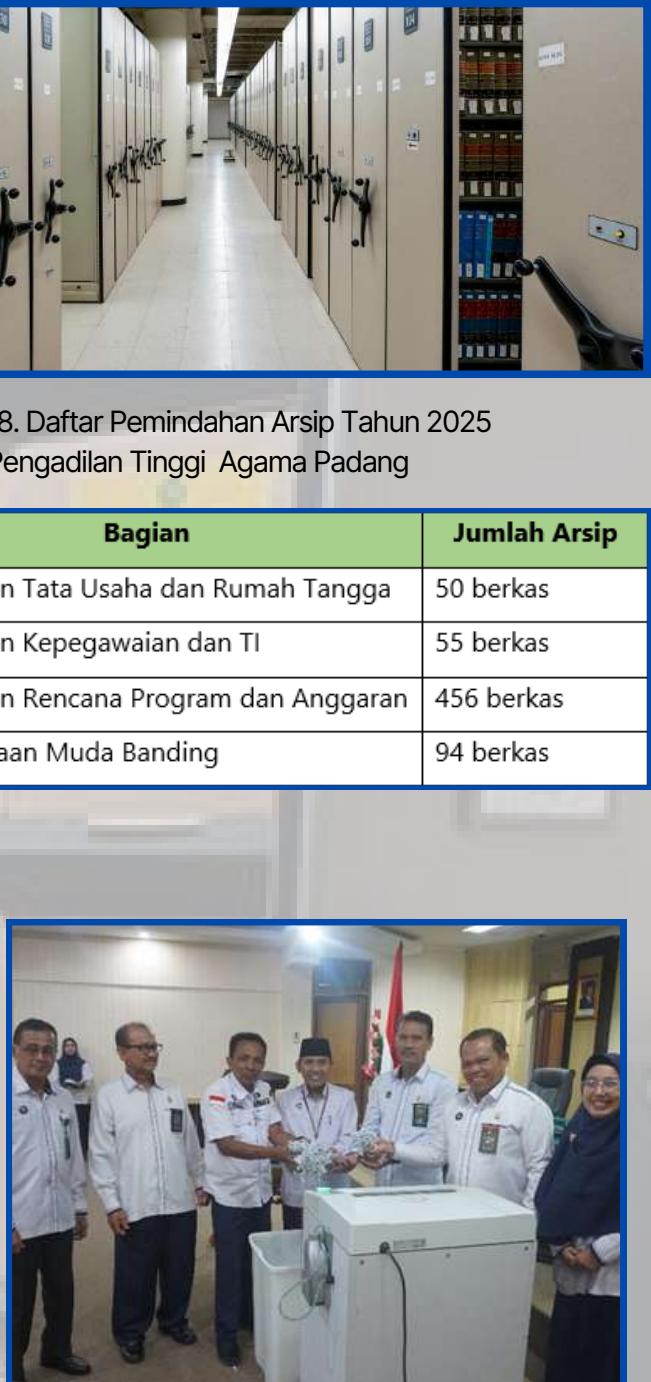


Tabel 38. Daftar Pemindahan Arsip Tahun 2025  
Pengadilan Tinggi Agama Padang

No.	Bagian	Jumlah Arsip
1.	Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	50 berkas
2.	Sub Bagian Kepegawaian dan TI	55 berkas
3.	Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	456 berkas
4.	Kepaniteraan Muda Banding	94 berkas

# PEMUSNAHAN ARSIP

Pemusnahan arsip dilaksanakan untuk mengurangi jumlah volume arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna dan melakukan efisiensi sehingga memudahkan pencarian arsip yang dibutuhkan serta memberikan tempat bagi arsip yang baru. Pengadilan Tinggi Agama Padang telah melakukan pemusnahan arsip di bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan Februari 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor 167 /SEK/SK.KA2.2/1/2025 tentang Penetapan Pemusnahan Arsip Pengadilan Tinggi Agama Padang. Pemusnahan arsip dilakukan dengan menggunakan metode pencacahan. Adapun arsip yang dimusnahkan meliputi **171** arsip di bagian kepaniteraan dan **255** arsip di bagian kesekretariatan.



Selain melakukan pemusnahan arsip kepaniteraan dan arsip kesekretariatan ditahun 2025, Pengadilan Tinggi Agama Padang juga kembali mengusulkan permohonan persetujuan pemusnahan arsip ke Sekretaris Mahkamah Agung di tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.



Tabel 39. Daftar Usulan Arsip yang Akan Dimusnahkan Tahun 2025  
Pengadilan Tinggi Agama Padang

No.	Unit Pengolah	Jumlah Arsip yang Diusulkan Musnah
1	Bagian Kepaniteraan	256 berkas
2	Bagian Kesekretariatan	478 berkas

Sampai akhir tahun 2025, penilaian terhadap Daftar Arsip Usul Musnah Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2025 yang diusulkan ke Sekretaris Mahkamah Agung masih dilakukan penilaian.

Sebagai unit kearsipan II, Pengadilan Tinggi Agama Padang juga melakukan kawal terhadap satuan kerja tingkat pertama yang akan melakukan kegiatan pemusnahan arsip dan penyerahan arsip statis untuk kemudian dikoordinasikan kepada Biro Umum Mahkamah Agung selaku Unit Kearsipan I. Berikut satuan kerja yang sudah berhasil melakukan kegiatan pemusnahan arsip dan penyerahan arsip statis di tahun 2025:

Tabel 33. Daftar Satker yang Telah Melaksanakan Pemusnahan Arsip

No.	Satuan Kerja	Waktu Pemusnahan
1.	Pengadilan Agama Batusangkar	Februari 2025
2.	Pengadilan Agama Pariaman	April 2025
3.	Pengadilan Agama Sawahlunto	September 2025

Tabel 34. Daftar Satker yang Telah Melaksanakan Penyerahan Arsip Statis

No.	Satuan Kerja	Waktu Penyerahan
1.	Pengadilan Agama Sawahlunto	17 September 2025



# PEMBINAAN KEARSIPAN

Demi terwujudnya pemahaman dan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan kaidah kearsipan, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan kegiatan pembinaan satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang. Kegiatan pembinaan yang dilakukan berupa coaching penerapan jadwal retensi arsip dalam pemusnahan arsip.

Pengadilan Tinggi Agama Padang melaksanakan pengawalan terhadap satuan kerja tingkat pertama yang akan melaksanakan kegiatan pemusnahan arsip.

Pengawalan tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap permohonan pemusnahan arsip yang diusulkan oleh satuan kerja, selanjutnya dikoordinasikan dengan Biro Umum Mahkamah Agung selaku Unit Kearsipan I, untuk kemudian dilakukan penilaian oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Berikut satuan kerja yang telah mengusulkan pemusnahan arsip ke Biro Umum.

Tabel 35. Daftar Satker yang Telah Mengusulkan Pemusnahan Arsip Tahun 2025

No.	Satuan Kerja	Tahap Kegiatan
1	Pengadilan Agama Batusangkar	Penilaian ANRI
2	Pengadilan Agama Padang	Penilaian ANRI
3	Pengadilan Agama Pariaman	Penilaian PTA Padang
4	Pengadilan Agama Maninjau	Penilaian PTA Padang



# PENGELOLAAN PEPUSTAKAAN

Pengelolaan perpustakaan di Pengadilan Tinggi Agama Padang meliputi kegiatan pendataan koleksi buku, pelayanan peminjaman dan pengembalian buku yang dilaksanakan oleh petugas perpustakaan dengan menggunakan aplikasi Senayan Library Management System (SLiMS).

Perpustakaan Pengadilan Tinggi Agama Padang per 31 Desember 2025 telah mengoleksi 4.334 buah buku dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36. Daftar Satker yang Telah Mengusulkan Pemusnahan Arsip Tahun 2025

No	Jenis Buku	Jumlah
1	Umum	3.910
2	Hukum	191
3	Agama Islam	139
4	Jurnal/Buletin/Majalah	74
5	Produk MA-RI	19
6	Referensi	1



Pada tahun 2025, Aplikasi SLiMS terpusat di Mahkamah Agung mengalami kerusakan server yang mengakibatkan hilangnya seluruh data pada aplikasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang telah melaksanakan migrasi data dan berhasil memulihkan kembali data perpustakaan yang terdampak. Kegiatan migrasi dan pemulihan data tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 146/BUA.6/PS1.2/IX/2025 tanggal 19 September 2025 tentang Pemberitahuan Perubahan Akses Aplikasi Perpustakaan (SLiMS).

Sebagai dasar legalitas kelembagaan perpustakaan, pada tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Padang telah terdaftar pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) 1371114A0000002 sebagai perpustakaan khusus.

Dalam rangka mendukung tertib administrasi dan pengelolaan perpustakaan, mahasiswa magang dari Universitas Islam Negeri (UIN) Padang turut berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan buku milik Barang Milik Negara (BMN) yang berada di perpustakaan, serta melaksanakan penyampulan buku guna menjaga kondisi fisik koleksi agar tetap rapi dan terpelihara dengan baik.



Pada bulan November 2025, mahasiswa Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang (UNP) melaksanakan kegiatan kunjungan akademik ke Perpustakaan Pengadilan Tinggi Agama Padang. Kunjungan ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pemahaman mahasiswa mengenai pengelolaan perpustakaan khusus, khususnya dalam penerapan layanan, pengolahan koleksi, serta tata kelola perpustakaan di lingkungan peradilan.



# PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

## REALISASI ANGGARAN BELANJA MODAL TAHUN 2025

Pemeliharaan di Pengadilan Tinggi Agama Padang meliputi pemeliharaan/perawatan gedung dan halaman kantor, rumah dinas, dan sarana prasarana kantor, pemeliharaan peralatan dan mesin dan perlengkapan Organisasi.

### RENOVASI PTSP



### PEMASANGAN AC SPLIT



## PEMELIHARAAN GEDUNG DAN RUMAH DINAS





# PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI



# IMPLEMENTASI E-COURT DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG



**e - Court**  
The Electronics Justice System

Tabel 37. Perkara e-Court Tahun 2025  
Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Satker	Jumlah Perkara e-Court
1	PA Padang	2319
2	PA Pariaman	1268
3	PA Batusangkar	735
4	PA Bukittinggi	904
5	PA Payakumbuh	1003
6	PA Sawahlunto	204
7	PA Solok	508
8	PA Padang Panjang	364
9	PA Muara Labuh	559
10	PA Sijunjung	487
11	PA Koto Baru	901
12	PA Painan	1136
13	PA Lubuk Sikaping	672
14	PA Talu	1020
15	PA Maninjau	220
16	PA Tanjung Pati	733
17	PA Lubuk Basung	567
18	PA Pulau Punjung	829
<b>JUMLAH</b>		<b>14429</b>

Dalam rangka mewujudkan pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan maka perlu diadakan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan dengan menyesuaikan perkembangan zaman maka mengharuskan adanya pelayanan administrasi di Pengadilan secara efektif dan efisien.

Pada tahun 2025, seluruh Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang telah melaksanakan persidangan secara elektronik atau e-Litigation. Sebanyak **14.429** perkara didaftarkan melalui e-court. Rekapitulasi perkara E-Court pada Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel disamping.

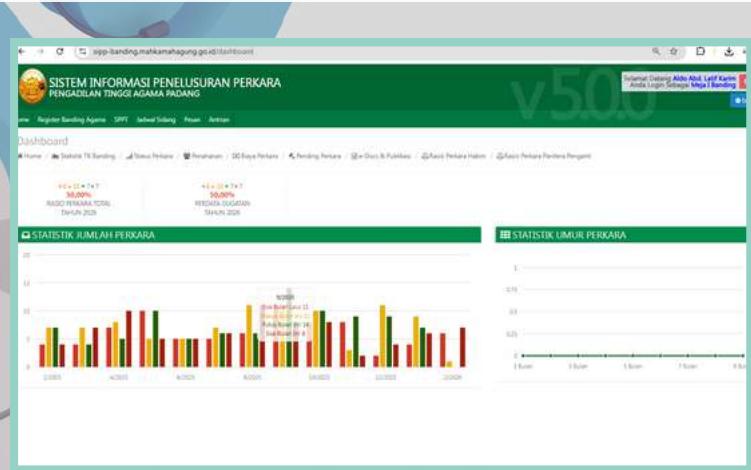
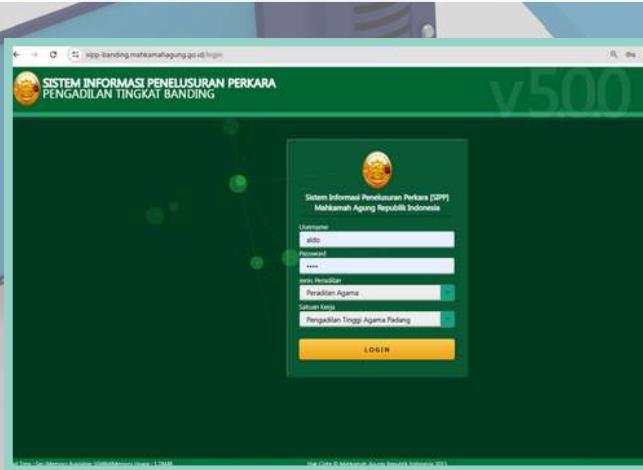
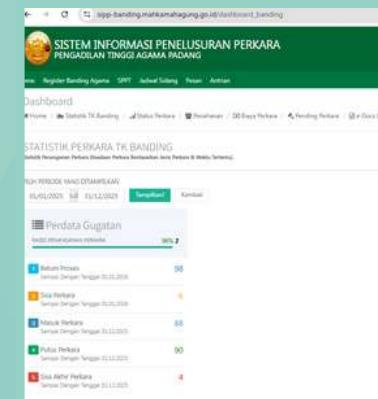
# PERKARA BANDING MELALUI E-COURT DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Tabel 38. Perkara e-Court Banding Tahun 2025  
Pengadilan Tinggi Agama Padang

NO	Nomor Perkara Banding	Nomor Perkara Tingkat Pertama	Tanggal Daftar
1	2/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	511/Pdt.G/2024/PA.Bkt	10/01/2025
2	4/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	1125/Pdt.G/2024/PA.Pdg	04/02/2025
3	5/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	645/Pdt.G/2024/PA.Prm	04/02/2025
4	6/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	595/Pdt.G/2024/PA.Bkt	11/02/2025
5	7/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	610/Pdt.G/2024/PA.Bsk	17/02/2025
6	8/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	191/Pdt.G/2024/PA.Min	19-02-2025
7	9/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	1428/Pdt.G/2024/PA.Pdg	25/02/2025
8	10/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	622/Pdt.G/2024/PA.Bkt	26/02/2025
9	11/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	706/Pdt.G/2024/PA.Pyk	03/03/2025
10	12/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	377/Pdt.G/2024/PA.Slk	11/03/2025
11	13/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	272/Pdt.G/2024/PA.ML	11/03/2025
12	14/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	32/Pdt.G/2025/PA.Slk	17/03/2025
13	15/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg	19/03/2025
14	16/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	29/Pdt.G/2025/PA.Bkt	21/03/2025
15	17/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	238/Pdt.G/2024/PA.SJJ	26/03/2025
16	18/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	31/Pdt.G/2024/PA.PPP	17/04/2025
17	19/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	1725/Pdt.G/2024/PA.Pdg	23/04/2025
18	20/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	1401/Pdt.G/2024/PA.Pdg	23/04/2025
19	21/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	480/Pdt.G/2024/PA.TALU	23/04/2025
20	22/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	71/Pdt.G/2025/PA.Bkt	28/04/2025
21	23/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	88/Pdt.G/2025/PA.Pyk	28/04/2025
22	24/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	46/Pdt.G/2025/PA.KBr	28/04/2025
23	26/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	632/Pdt.G/2024/PA.Bkt	08/05/2025
24	27/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	128/Pdt.G/2025/PA.Pdg	14/05/2025
25	28/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	26/Pdt.G/2025/PA.Plj	20/05/2025
26	29/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	1421/Pdt.G/2024/PA.Pdg	21/05/2025
27	30/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg	27/05/2025
28	31/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	140/Pdt.G/2025/PA.Bkt	2/6/2025
29	32/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	240/Pdt.G/2025/PA.Pdg	12/06/2025
30	33/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	27/Pdt.G/2025/PA.SJJ	16/06/2025
31	34/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	42/Pdt.G/2025/PA.Pyk	18/06/2025
32	35/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	197/Pdt.G/2025/PA.Pyk	25/06/2025
33	36/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	35/Pdt.G/2025/PA.TALU	02/07/2025
34	37/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	631/Pdt.G/2024/PA.TALU	04/07/2025
35	38/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	43/Pdt.G/2025/PA.Slk	25/07/2025
36	39/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	81/Pdt.G/2025/PA.Pn	25/07/2025
37	40/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	172/Pdt.G/2025/PA.Bkt	25/07/2025
38	41/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	164/Pdt.G/2025/PA.Bsk	31/07/2025
39	42/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	258/Pdt.G/2025/PA.TALU	31/07/2025
40	43/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	128/Pdt.G/2025/PA.Lbs	06/08/2025
41	44/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	164/Pdt.G/2025/PA.Bkt	07/08/2025
42	45/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	168/Pdt.G/2025/PA.Slk	13/08/2025
43	46/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	395/Pdt.G/2025/PA.Pdg	15/08/2025
44	47/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	1541/Pdt.G/2024/PA.Pdg	21/08/2025
45	48/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	624/Pdt.G/2025/PA.Pdg	21/08/2025
46	49/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	504/Pdt.G/2025/PA.Pdg	22/08/2025
47	50/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	620/Pdt.G/2025/PA.Pdg	25/08/2025
48	51/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	303/Pdt.G/2025/PA.Pdg	28/08/2025
49	52/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	323/Pdt.G/2025/PA.Bkt	29/08/2025
50	53/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	370/Pdt.G/2025/PA.Prm	29/08/2025
51	54/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	663/Pdt.G/2024/PA.TALU	4/9/2025
52	55/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	206/Pdt.G/2025/PA.TALU	4/9/2025
53	56/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	718/Pdt.G/2025/PA.Pdg	4/9/2025
54	57/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	469/Pdt.G/2025/PA.Pdg	15/09/2025
55	58/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	431/Pdt.G/2025/PA.Bkt	16/09/2025
56	59/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	6/Pdt.G/2025/PA.PPP	19/09/2025
57	60/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	285/Pdt.G/2025/PA.LK	22/09/2025
58	61/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	323/Pdt.G/2025/PA.Pn	22/09/2025
59	62/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	171/Pdt.G/2025/PA.PPP	23/09/2025
60	63/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	182/Pdt.G/2025/PA.Pn	24/09/2025
61	64/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	187/Pdt.G/2025/PA.LK	30/09/2025
62	65/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	941/Pdt.G/2025/PA.Pdg	15/10/2025
63	66/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	404/Pdt.G/2025/PA.Bsk	16/10/2025
64	67/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	97/Pdt.G/2025/PA.ML	17/10/2025
65	68/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	543/Pdt.G/2025/PA.Pdg	22/10/2025
66	69/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	101/Pdt.G/2025/PA.Min	23/10/2025
67	70/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	251/Pdt.G/2025/PA.LB	23/10/2025
68	71/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	378/Pdt.G/2025/PA.Pyk	24/10/2025
69	72/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	375/Pdt.G/2025/PA.Bkt	30/10/2025
70	73/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	391/Pdt.G/2025/PA.Pyk	30/10/2025
71	74/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	570/Pdt.G/2025/PA.Prm	31/10/2025
72	75/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	261/Pdt.G/2025/PA.TALU	3/11/2025
73	76/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	245/Pdt.G/2025/PA.Slk	7/11/2025
74	77/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	1163/Pdt.G/2024/PA.Pdg	17/11/2025
75	78/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	1210/Pdt.G/2025/PA.Pdg	2/12/2025
76	79/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	246/Pdt.G/2025/PA.ML	2/12/2025
77	80/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	1167/Pdt.G/2025/PA.Pdg	8/12/2025
78	81/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	1019/Pdt.G/2025/PA.Pdg	8/12/2025
79	82/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	142/Pdt.G/2025/PA.Pdg	9/12/2025
80	83/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	593/Pdt.G/2025/PA.Bkt	12/12/2025
81	84/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	538/Pdt.G/2025/PA.Pdg	16/12/2025
82	85/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	1217/Pdt.G/2025/PA.Pdg	16/12/2025
83	86/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	582/Pdt.G/2025/PA.KBr	19/12/2025
84	87/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	355/Pdt.G/2025/PA.LB	19/12/2025
85	88/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	548/Pdt.G/2025/PA.Bkt	19/12/2025

**e - Court**  
The Electronics Justice System

# SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)



## PUBLIKASI PERKARA (ONE DAY PUBLISH)

Tabel 39. Upload Putusan (One Day publish) Tahun 2025  
Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Satker	Jumlah Perkara yang Diputus	Jumlah Perkara yang Diupload	Belum Upload	(%)
1	PA Padang	2367	2367	0	100%
2	PA Pariaman	1240	1240	0	100%
3	PA Batusangkar	742	742	0	100%
4	PA Bukittinggi	903	903	0	100%
5	PA Payakumbuh	1037	1037	0	100%
6	PA Sawahlunto	200	200	0	100%
7	PA Solok	504	504	0	100%
8	PA Padang Panjang	357	357	0	100%
9	PA Muara Labuh	552	552	0	100%
10	PA Sijunjung	459	459	0	100%
11	PA Koto Baru	898	898	0	100%
12	PA Painan	1132	1132	0	100%
13	PA Lubuk Sikaping	665	665	0	100%
14	PA Talu	1033	1033	0	100%
15	PA Maninjau	219	219	0	100%
16	PA Tanjung Pati	713	713	0	100%
17	PA Lubuk Basung	568	568	0	100%
18	PA Pulau Punjung	841	841	0	100%
<b>Jumlah</b>		<b>14430</b>	<b>14430</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

# DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Direktori Putusan Mahkamah Agung adalah media transparansi informasi perkara serta publikasi putusan yang merupakan produk Pengadilan. Setiap perkara yang telah putus, harus segera dipublikasikan di Direktori Putusan dengan mengisi informasi perkara dan mengupload dokumen putusan atau penetapan yang sudah dikaburkan (anonimasi), sehingga kinerja penyelesaian suatu perkara dapat terbaca melalui Direktori Putusan, serta dokumen putusan dapat diakses secara bebas oleh publik.

# WEBSITE PENGADILAN AGAMA SE-SUMATERA BARAT

Dalam mendukung terwujudnya keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. PTA Padang telah memiliki media informasi berupa website yang dapat diakses melalui <http://www.pta-padang.go.id>.

NO	SATKER	Alamat Website
1	PA Padang	<a href="https://www.pa-padang.go.id/">https://www.pa-padang.go.id/</a>
2	PA Pariaman	<a href="http://www.pa-pariaman.go.id/">http://www.pa-pariaman.go.id/</a>
3	PA Solok	<a href="https://www.pa-solok.go.id/">https://www.pa-solok.go.id/</a>
4	PA Batusangkar	<a href="https://pa-batusangkar.go.id/">https://pa-batusangkar.go.id/</a>
5	PA Padang Panjang	<a href="https://www.pa-padangpanjang.go.id/">https://www.pa-padangpanjang.go.id/</a>
6	PA Muara Labuh	<a href="https://www.pa-muaralabuh.go.id/">https://www.pa-muaralabuh.go.id/</a>
7	PA Sijunjung	<a href="https://pa-sijunjung.go.id/">https://pa-sijunjung.go.id/</a>
8	PA Koto Baru	<a href="https://www.pa-kotobaru.go.id/">https://www.pa-kotobaru.go.id/</a>
9	PA Painan	<a href="https://www.pa-painan.go.id/">https://www.pa-painan.go.id/</a>
10	PA Lubuk Sikaping	<a href="https://www.pa-lubuksikaping.go.id/">https://www.pa-lubuksikaping.go.id/</a>
11	PA Talu	<a href="https://www.pa-talu.go.id/">https://www.pa-talu.go.id/</a>
12	PA Maninjau	<a href="https://www.pa-maninjau.go.id/">https://www.pa-maninjau.go.id/</a>
13	PA Payakumbuh	<a href="https://www.pa-payakumbuh.go.id/">https://www.pa-payakumbuh.go.id/</a>
14	PA Tanjung Pati	<a href="http://pa-tanjungpati.go.id/">http://pa-tanjungpati.go.id/</a>
15	PA Lubuk Basung	<a href="http://www.pa-lububasung.go.id/">http://www.pa-lububasung.go.id/</a>
16	PA Sawahlunto	<a href="http://www.pa-sawahlunto.go.id/">http://www.pa-sawahlunto.go.id/</a>
17	PA Bukittinggi	<a href="http://www.pa-bukittinggi.go.id/">http://www.pa-bukittinggi.go.id/</a>
18	PA Pulaupunjung	<a href="http://pa-pulaupunjung.go.id/">http://pa-pulaupunjung.go.id/</a>



# BAB V

## PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK



# KEBERLANJUTAN ZONA INTEGRITAS

Pengadilan Tinggi Agama Padang meraih Penganugerahan Zona Integritas untuk Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tersebut melalui zoom meeting yang diikuti oleh Ketua PTA Padang periode 2019-2022 Drs. H. Zein Ahsan M.H, beserta Wakil Ketua PTA Padang Dr. Abd. Hakim, M.H.I, jajaran hakim tinggi serta seluruh pegawai PTA Padang di Ruang Command Centre PTA Padang. Pengadilan Tinggi Agama Padang terus berupaya untuk melanjutkan perjuangan dalam meraih Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).



Pada tahun 2025, PTA Padang kembali melanjutkan komitmennya dalam membangun Zona Integritas sebagai upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Pembangunan ini dilaksanakan secara bertahap dengan berfokus pada enam (6) area perubahan, meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam perkembangannya, pembangunan Zona Integritas masih berada pada tahap penilaian mandiri, dan belum memasuki tahapan desk evaluasi.

Pada Tahun 2025, terdapat 2 satker yang masuk ke tahap akhir Desk Evaluation – Wawancara Zona Integritas menuju WBK di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang, yakni PA Payakumbuh dan PA Lubuk Basung. Namun, kedua satker tersebut belum berhasil meraih WBK Tahun 2025.



Pada tanggal 2 Desember 2025, Mahkamah Agung mengumumkan satuan kerja yang berhasil meraih WBK melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 27570/SK/SK.PW1/XI/2025 tanggal 28 November 2025 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Secara Mandiri Tahun 2025.

Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Nasional Mahkamah Agung RI, ada 19 satuan kerja yang berhasil mendapatkan predikat WBK dengan rincian 7 (tujuh) satuan kerja di lingkungan peradilan umum, 10 satuan kerja dari lingkungan peradilan agama, dan 2 (dua) satuan kerja dari lingkungan peradilan tata usaha negara.





# Petugas PTSP

## PTA PADANG



## PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)



# PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelayanan Terpadu satu Pintu (One Gate Integrated Service) merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan pelayanan kepada publik khususnya para pencari keadilan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tersebut agar mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, terjangkau dan terintegrasi, maka seluruh Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang telah memberlakukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Irma

Riccelia

Sari

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan dan SOP pelayanan, petugas layanan yang cakap dan profesional, serta pemantauan pengawas setiap saat, dari permintaan informasi yang masuk tidak ada yang tidak dilayani dan tidak satupun komplain terhadap pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Tahun 2025 terdapat 4 satker di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang yang mendapatkan anggaran Belanja Modal Renovasi Ruang PTSP. Satker tersebut adalah Pengadilan Tinggi Agama Padang, Pengadilan Agama Padang, Pengadilan Agama Kotobaru, dan Pengadilan Agama Painan.



# PELAYANAN INFORMASI PADA PTSP

Terdapat 3 bagian pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Tinggi Agama Padang, diantaranya:

1. Layanan Pengaduan, terdiri dari Layanan Pengaduan Lisan, Tertulis, Pengaduan Melalui Saluran Lain
2. Layanan Prioritas, terdiri dari Teknis Yustisial Perkara Banding, Pelayanan Administrasi Perkara Banding, Pelayanan Administrasi Peradilan Lainnya, Peningkatan Kualitas Layanan, dan Layanan Antrian Prioritas.
3. Layanan Informasi, terdiri dari Sistem Informasi Manajemen Perkara, Permohonan Langsung, Permohonan Elektronik, dan Layanan PPID.

Pengadilan Tinggi Agama Padang berhasil mempertahankan pencapaian dalam mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel. Penyelesaian perkara mencapai target 100%, sehingga tingkat kepuasan pengguna layanan, baik di tingkat pertama maupun pencari keadilan, sesuai dengan yang ditetapkan.

Hasil survei Indeks Persepsi juga menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang, yang tetap terjaga dengan baik. Komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Padang, serta aparatur di wilayah yurisdiksinya, terus dipertahankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan.



## Aplikasi PTSP Online & Call Center PTA Padang



## SARANA DAN PRASARANA PTSP

Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Padang direalisasikan dengan mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan penyampaian informasi peradilan dan keterjangkauan terhadap pelayanan peradilan melalui layanan meja informasi, website Pengadilan Tinggi Agama Padang hingga direktori putusan. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan.

Meja Informasi di Pengadilan Tinggi Agama Padang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan, yaitu: seperangkat alat pengolah data, personal komputer yang Terhubung dengan SIPP, VMS (Visit or Management System), formulir dan buku register permohonan informasi, TV LCD yang berisi informasi, meja dan kursi, alat tulis dan sarana dan prasarana lain yang menunjang pelayanan meja informasi.

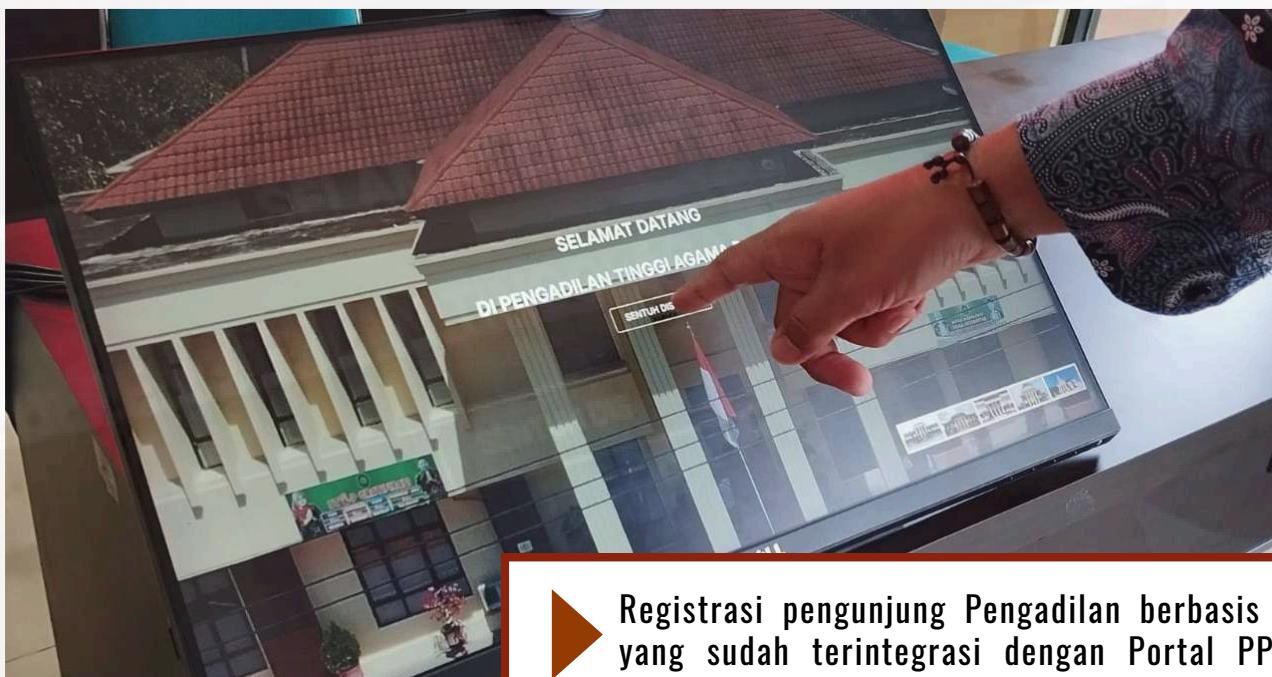
Dalam hal permintaan informasi datang dari atau permintaan dari masyarakat umum maupun masyarakat yang berasal dari golongan disabilitas maka Pengadilan Tinggi Agama Padang telah menyediakan prasarana atau aksesibilitas, seperti Parkir Disabilitas, Kursi Roda, Toilet Disabilitas



# INOVASI LAYANAN INFORMASI

Sistem Aplikasi Pengunjung Pengadilan Terintegrasi  
( <https://sasuai.pta-padang.go.id/> )

E-SASUAI



Registrasi pengunjung Pengadilan berbasis TI yang sudah terintegrasi dengan Portal PPID PTA Padang.

Dilengkapi QR Code jadwal kunjungan untuk pengguna layanan permintaan informasi.

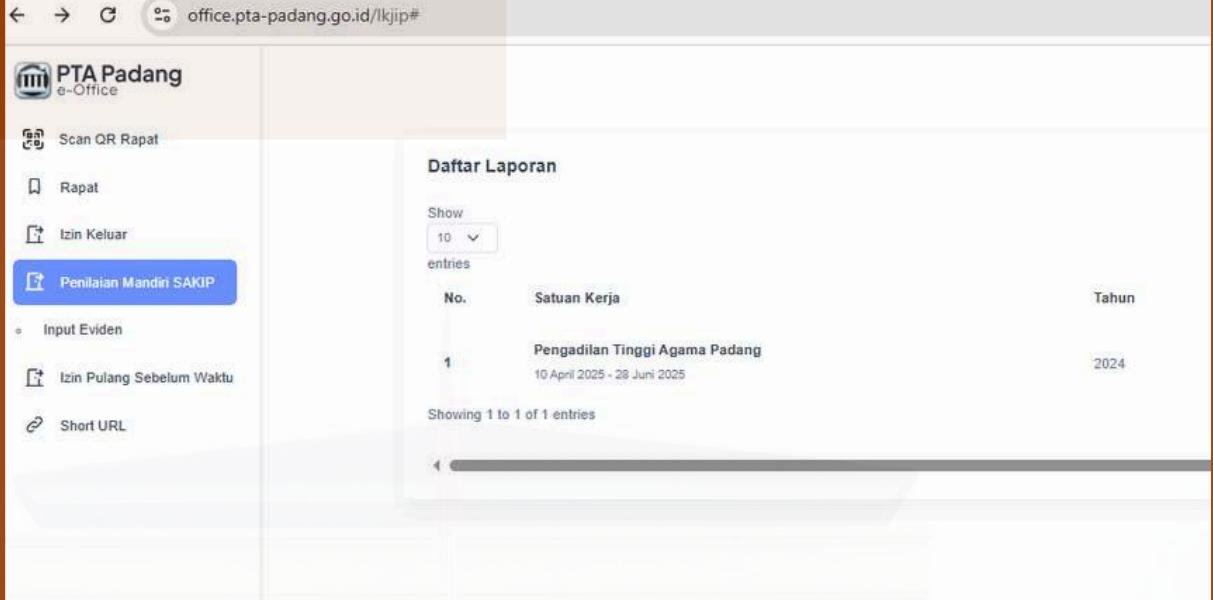
Portal PPID PTA Padang  
(<https://ppid.pta-padang.go.id/>)



# INOVASI ABSENSI DAN IZIN DINAS

(<https://office.pta-padang.go.id/>)

E-OFFICE

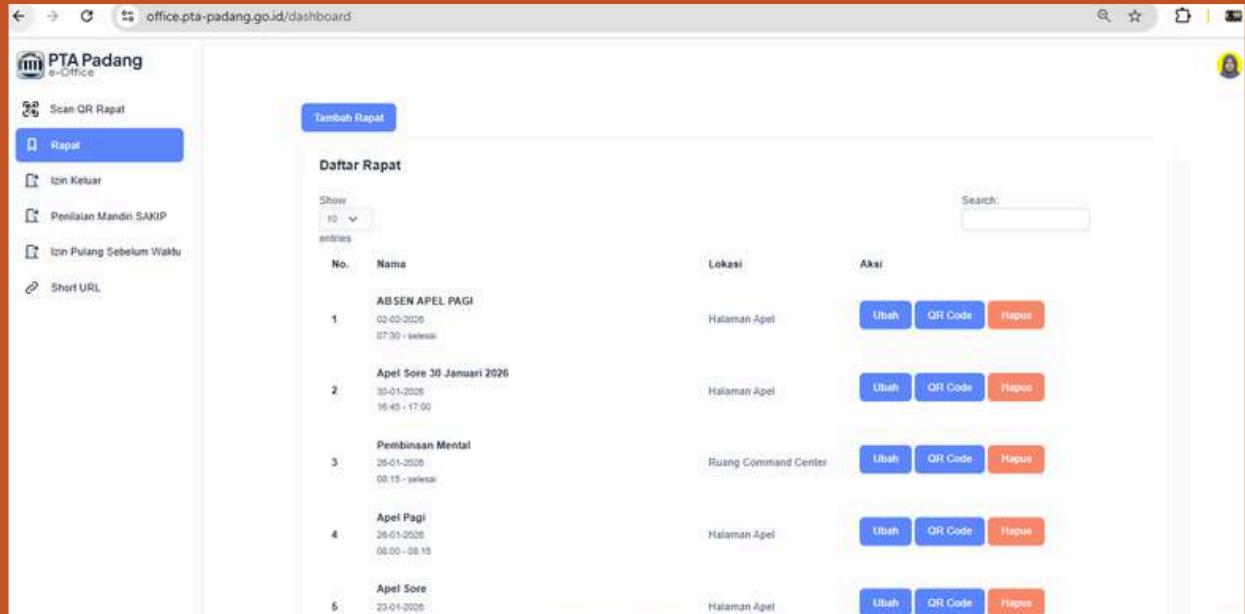


The screenshot shows the e-Office dashboard with a sidebar on the left containing links for Scan QR Rapat, Rapat, Izin Keluar, Penilaian Mandiri SAKIP, Input Eviden, Izin Pulang Sebelum Waktu, and Short URL. The main area is titled 'Daftar Laporan' and shows a table with one entry:

No.	Satuan Kerja	Tahun
1	Pengadilan Tinggi Agama Padang 10 April 2025 - 28 Juni 2025	2024

Showing 1 to 1 of 1 entries

Aplikasi terintegrasi yang digunakan untuk keperluan perkantoran, seperti absensi rapat, izin keluar pegawai, izin pulang sebelum waktu, absensi petugas PTSP, serta menu akuntabilitas kinerja.



The screenshot shows the e-Office dashboard with a sidebar on the left containing links for Scan QR Rapat, Rapat (which is selected and highlighted in blue), Izin Keluar, Penilaian Mandiri SAKIP, Izin Pulang Sebelum Waktu, and Short URL. The main area is titled 'Daftar Rapat' and shows a table with six entries:

No.	Nama	Lokasi	Aksi
1.	ABSEN APEL PAGI 03-01-2026 07:30 - selesai	Halaman Apel	<a href="#">Ubah</a> <a href="#">QR Code</a> <a href="#">Hapus</a>
2.	Apel Sore 30 Januari 2026 30-01-2026 16:45 - 17:00	Halaman Apel	<a href="#">Ubah</a> <a href="#">QR Code</a> <a href="#">Hapus</a>
3.	Pembinaan Mental 28-01-2026 09:15 - selesai	Ruang Command Center	<a href="#">Ubah</a> <a href="#">QR Code</a> <a href="#">Hapus</a>
4.	Apel Pagi 29-01-2026 08:00 - 08:15	Halaman Apel	<a href="#">Ubah</a> <a href="#">QR Code</a> <a href="#">Hapus</a>
5.	Apel Sore 23-01-2026	Halaman Apel	<a href="#">Ubah</a> <a href="#">QR Code</a> <a href="#">Hapus</a>

# INOVASI DATABASE KINERJA SATKER SE-WILAYAH PTA PADANG (<https://dbi.pta-padang.go.id>)

## Kinerja Tingkat Pertama

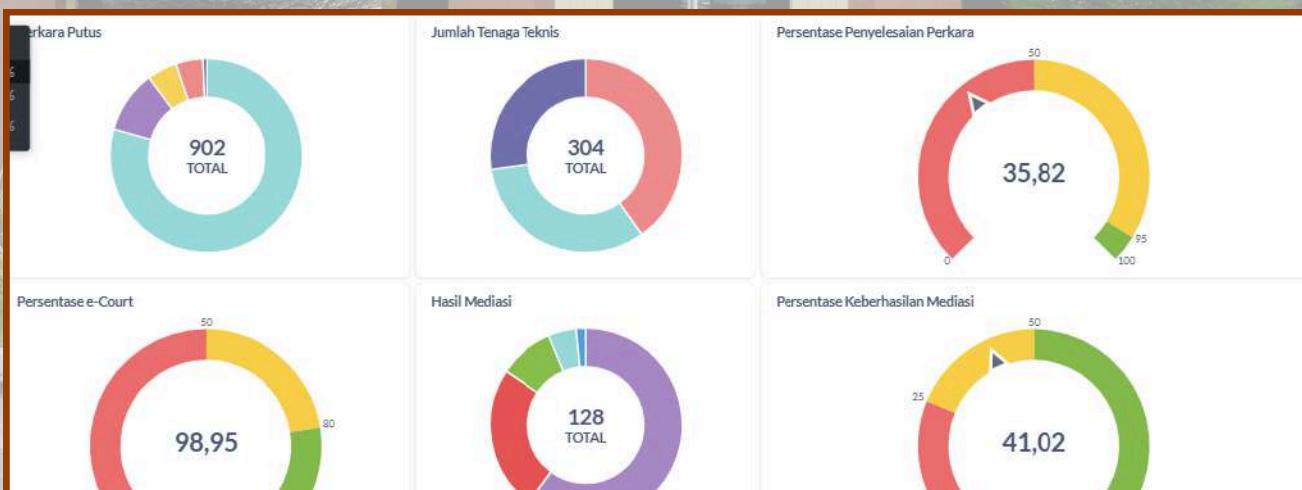
T Satuan Kerja    T Tanggal Awal    T Tanggal Akhir

### Rekap Kinerja



Sinkronisasi Database  
Referensi  
PA Koto Baru  
PA Pariaman  
PA Sijunjung  
PA Sawahlunto  
PA Payakumbuh  
PA Batu Sangkar  
PA Lubuk Basung  
PA Solok  
PA Maninjau  
PA Talu  
PA Lubuk Sikaping  
PA Padang  
PA Painan  
PA Bukittinggi  
PA Pulau Punjung  
PA Muara Labuh  
PA Padang Panjang

merupakan inovasi dalam menampilkan bahan monitoring kinerja Pengadilan Agama se-wilayah PTA Padang dan untuk mengukur IKU PTA Padang dalam bentuk database yang dapat dibuka menggunakan HP/Gadget, Laptop maupun PC. [Link](#) inovasi ini sangat membantu Hakim Pengawas Daerah dalam melaksanakan pengawasan di bidang Administrasi Perkara.



# INOVASI APLIKASI SATKER DI WILAYAH PTA PADANG



## ▶ LAKESPA (PA Bukittinggi)

Layanan kesehatan pegawai dalam rangka mewujudkan kesehatan pegawai dan pengguna layanan melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan

## ▶ KUDA PADATI (PA Bukittinggi)

Kuda Padati merupakan salah satu inovasi penguatan integritas berupa penandatanganan blangko Pakta Integritas bagi seluruh pengguna layanan sebelum menerima layanan

## ▶ SITIRAI (PA Bukittinggi)

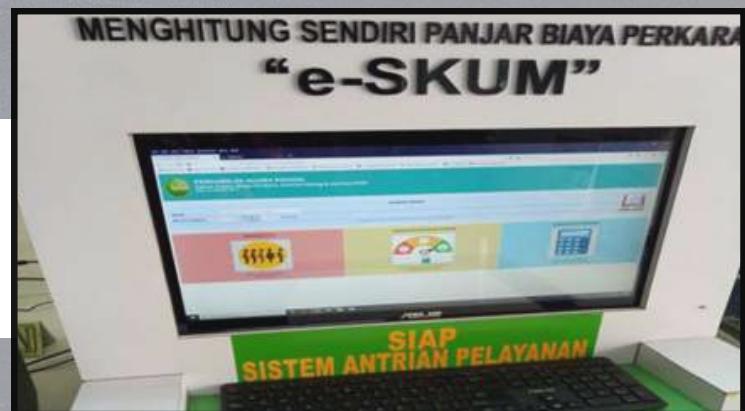
SITIRAI (Notifikasi Akta Cerai) merupakan inovasi yang menggunakan aplikasi WhatsApp dan Google SpreadSheet. Fungsinya untuk mengirimkan notifikasi mengenai akta cerai yang telah bisa diambil oleh para pihak yang perkaryanya telah selesai melalui pesan WhatsApp secara otomatis.

## ▶ SIPIJAR (PA Bukittinggi)

SIPIJAR (Notifikasi pengembalian Sisa Panjar) Inovasi ini menggunakan aplikasi WA dan google spread untuk mengirimkan notifikasi mengenai jumlah uang sisa panjar para pihak yang perkaryanya sudah putus melalui pesan aplikasi WA

### ► **E-SKUM (PA Padang)**

Layanan menghitung sendiri Panjar Biaya Perkara



### ► **SIMPATIK (PA Tanjung Pati)**

SIMPATIK hadir untuk memberikan akses hukum kepada masyarakat dengan menggunakan mobil keliling, diantaranya: Pendaftaran perkara e-court; Informasi dan konsultasi hukum; Penyerahan produk pengadilan; Pos bantuan Hukum.



### ► **LANSEK MANIH (PA Sijunjung)**

Singkatan dari Layanan PTSP Keliling Melayani Dengan Humanis. Petugas dari PA Sijunjung akan memberikan layanan, berupa : 1. Layanan Informasi, Konsultasi dan pengaduan; 2. Penerimaan dan Pendaftaran Perkara; 3. Penyerahan Akta Cerai 4. Penyerahan siswa panjar biaya perkara.



### ► **MALL PELAYANAN PUBLIK (PA Padang)**

merupakan bagian dari langkah strategis yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Padang untuk memudahkan masyarakat Kota Padang dalam memperoleh layanan, baik memperoleh informasi maupun pengambilan produk pengadilan. Adapun Jam Pelayanan MPP PA Padang ini sejak hari Senin s.d. Jum'at Pukul 08.30 s.d. 12.00 WIB



# PENGAWASAN INTERNAL



## BAB VI PENGAWASAN

# PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan merupakan salah satu aspek manajemen yang memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Melalui pengawasan, pelaksanaan tugas dapat dijaga dan dikendalikan agar berjalan sesuai dengan rencana serta ketentuan yang berlaku. Pada hakikatnya, pengawasan merupakan bentuk pengendalian, di mana pengendalian tersebut mengandung dua aspek yang tidak terpisahkan, yaitu pengawasan dan pembinaan.

Pengawasan internal pada Pengadilan Tinggi Agama Padang terdiri atas dua jenis, yaitu:

- Pertama, pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang terhadap bidang-bidang tugas pada Pengadilan Tinggi Agama Padang, yang meliputi Bidang Kepaniteraan dan Bidang Kesekretariatan.
- Kedua, pengawasan reguler yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah (Hatibinwasda) PTA Padang terhadap seluruh Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang.



Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2025					
NO	NAMA	JABATAN / PENUGASAN	PENDAMPING	BIDANG PENGAWASAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. KOORDINATOR DAN SEKRETARIS</b>					
1.	Drs. H. Alaidin, M.H.	Wakil Ketua/Koordinator Pembinaan dan Pengawasan			
2.	Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.M., M.H.	Panitera/Sekretaris Koordinator Bidang Kepaniteraan			
3.	Dr. Irsyadi, S.Ag., M.A.	Sekretaris/Sekretaris Koordinator Bidang Kesekretariatan			
<b>B. HAKIM PENGAWAS BIDANG</b>					
NO	NAMA	JABATAN/ PENUGASAN	PENDAMPING	BIDANG PENGAWASAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dra. Zulfiarti	Hakim Utama/Hakim Pengawas Bidang	Aiyub Sami, S.E., S.H., M.M. Millia Sufia, S.E., S.H., M.M.	Manajemen Peradilan	
2.	Drs. Salwi, S.H.	Hakim Utama/Hakim Pengawas Bidang	Drs. H. Armen, S.H.	Administrasi Perkara	
3.	Drs. H. Idris, S.H.	Hakim Utama Madya/Hakim Pengawas Bidang			
4.	Dra. Armetis	Hakim Utama/Hakim Pengawas Bidang	Nora Oktavia, S.H.	Administrasi Persidangan	
5.	Dra. Burnalis, M.A.	Hakim Utama/Hakim Pengawas Bidang	Mukhlis, S.H. Berki Rahmat, S.Kom.	Administrasi Kesekretariatan	
6.	Drs. H. Nasrul.K, S.H., M.H.	Hakim Utama/Hakim Pengawas Bidang	Riswan, S.H.		
7.	Drs. Asfawi, M.H.	Hakim Utama/Hakim Pengawas Bidang	Ismail, S.H.I., M.A.	Pelayanan Publik	

# PENGAWASAN FUNGSIONAL

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain pengawasan yang dilakukan oleh Badan pengawasan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai pengadilan tingkat banding yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung berkewajiban mengawasi jalannya peradilan di lingkungan peradilan agama yang berada dalam wilayah hukumnya 2025.



## Penunjukan Hakim Pembina dan Pengawas Daerah Pada Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025

### PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PENUNJUKAN HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2025

NO	NAMA		JABATAN / PENUGASAN		KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A. KOORDINATOR DAN SEKRETARIS</b>						
1.	Drs. H. Alaidin, M.H.	Wakil Ketua/Koordinator Pembinaan dan Pengawasan				
2.	Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.M., M.H.	Panitera/Sekretaris Pembinaan dan Pengawasan				
3.	Dr. Irsyadi, S.Ag., M.A.	Sekretaris/Sekretaris Pembinaan dan Pengawasan				
<b>B. HAKIM PENGAWAS DAERAH</b>						
NO	NAMA	JABATAN/ PENUGASAN	PENDAMPING	WILAYAH PENGAWASAN	KET	
(1)	(2)	(3)	KEPANITERAAN	KESEKRETARIATAN	(6)	(7)
1.	Drs. H. Nasrul.K, S.H., M.H.	Hakim Utama/ Hakim Pengawas Daerah	Drs. H. Armen, S.H.	Nurasiyah Handayani.Rangkuti, S.H.	PA. Pariaman	
			Nora Oktavia, S.H.	Millia Sufia, S.E., S.H., M.M.	PA. Painan	
2.	Drs. Salwi, S.H.	Hakim Utama / Hakim Pengawas Daerah	Dra. Syuryati	Millia Sufia, S.E., S.H., M.M.	PA. Padang	
			H. Masdi, S.H.	Ismail, S.H.I., M.A.	PA. Tanjung Pati	
			H. Masdi, S.H.	Ismail, S.H.I., M.A.	PA. Lubuk Sikaping	
3.	Dra. Arnetis	Hakim Utama/ Hakim Pengawas Daerah	Dra. Suryati	Millia Sufia, S.E., S.H., M.M.	PA. Batusangkar	
			Nelly Oktavia, S.H	Mukhlis, S.H.	PA. Sijunjung	
			Hj. Alifah, S.H.	Nurasiyah Handayani.Rangkuti, S.H	PA. Maninjau	
4.	Dra. Burnalis, M.A	Hakim Utama/ Hakim Pengawas Daerah	Riswan, S.H.	Mukhlis, S.H.	PA. Talu	
			Minda Hayati, S.H.	Elvi Yunita, S.H., M.H.	PA. Solok	
5.	Dra. Zulfiarti	Hakim Utama/ Hakim Pengawas Daerah	Aiyub Sami, S.H., M.H.	Berki Rahmat, S.Kom.	PA. Muara Labuh	
			Misharni, S.H.	Elvi Yunita, S.H., M.H.	PA. Kotobaru	
			Nora Oktavia, S.H.	Ismail, S.H.I., M.A.	PA. Bukittinggi	
6.	Drs. Asfawi, M.H.	Hakim Utama/ Hakim Pengawas Daerah	Dra. Asmiyetti	Elvi Yunita, S.H., M.H.	PA. Lubuk Basung	
			Dra. Rusmawita	Nurasiyah Handayani.Rangkuti, S.H.	PA. Padang Panjang	
7.	Drs. H. Idris, S.H.	Hakim Utama Madya/ Hakim Pengawas Daerah	Riswan, S.H.	Mukhlis, S.H.	PA. Payakumbuh	
			Kutung Saraini, S.Ag	Berki Rahmat, S.Kom.	PA. Sawahlunto	
			Drs. Daryamurni	Berki Rahmat, S.Kom.	PA. Pulau Punjung	

# PENGAWASAN INTERNAL



Sebanyak 71 temuan hasil Pembinaan dan Pengawasan Daerah Triwulan I, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari sampai dengan 28 Februari 2025 melalui Aplikasi e-Binwas Badilag, telah ditindaklanjuti 100% oleh satuan kerja di wilayah PTA Padang



Sebanyak 194 temuan hasil Pembinaan dan Pengawasan Daerah Triwulan II, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September 2025 melalui Aplikasi e-Binwas Badilag, telah ditindaklanjuti 100% oleh satuan kerja di wilayah PTA Padang



Sebanyak 117 temuan hasil Pembinaan dan Pengawasan Daerah Triwulan III, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2025 melalui Aplikasi e-Binwas Badilag, telah ditindaklanjuti 100% oleh satuan kerja di wilayah PTA Padang



Sebanyak 106 temuan hasil Pembinaan dan Pengawasan Daerah Triwulan IV, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2025 melalui Aplikasi e-Binwas Badilag, telah ditindaklanjuti 100% oleh satuan kerja di wilayah PTA Padang



## BAB VII PENUTUP

# KESIMPULAN

- Bisnis proses Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat telah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Perkara banding yang diterima tahun 2025 sebanyak 88 perkara, sisa perkara tahun 2024 sebanyak 6 perkara sehingga jumlah perkara banding yang diterima yakni sejumlah 94 perkara. Dari 94 perkara banding tersebut berhasil diputus dan diselesaikan sejumlah 90 perkara, 4 perkara yang belum putus bukanlah sisa perkara, namun merupakan perkara yang masih berjalan, namun merupakan perkara yang diterima pada bulan Desember 2025, yang penyelesaiannya sesuai SOP ialah pada tahun 2026. Dari 90 perkara yang diputus, semuanya diselesaikan tepat waktu, sehingga kinerja penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk tahun 2025 adalah 100%. Sementara itu, perkara pada Pengadilan Agama se-Sumatera Barat Tahun 2025 diterima 14.480 perkara demikian juga ditambah dengan sisa perkara tahun 2024 sebanyak 518 perkara yang masih berjalan karena diterima pada pertengahan bulan Desember Tahun 2025. Perkara yang telah berhasil diputus sebanyak 14.430 perkara. Dari penyelesaian perkara tersebut, maka sisa perkara pada akhir tahun 2025 Pengadilan Agama se-Sumatera Barat sebanyak 568 perkara.
- Program Prioritas Nasional berupa Posbakum, Prodeo, Sidang di Luar Gedung, dan Sidang Terpadu. Anggaran posbakum pada tahun 2025 dapat direalisasikan sebesar 99,3% dari total pagu anggaran Rp.1.072.800.000 dengan layanan sebanyak 12.662 orang. Sidang di Luar Gedung Tahun 2025 berhasil direalisasikan sebesar 99,6% dari total pagu anggaran Rp.783.765.000 dengan jumlah perkara yang dilayani sebanyak 945 perkara.

Pembebasan biaya perkara Tahun 2025 berhasil direalisasikan sebesar 55,3% untuk 1.461 perkara, hal ini dikarenakan anggaran di blokir untuk memenuhi kebijakan efisiensi anggaran oleh negara, namun dengan anggaran yang terbatas dapat melebihi target kinerja, sehingga dilakukan revisi penambahan volume kinerja pada triwulan IV. Anggaran Sidang Terpadu berhasil direalisasikan sebesar 99,5% dari total anggaran Rp29.250.000, dengan jumlah perkara berhasil diselesaikan sebanyak 102 perkara pada 3 PA di Sumbar, yakni PA Bukittinggi, PA Lubuk Sikaping, dan PA Lubuk Basung.

- Sumber Daya Manusia pada wilayah Pengadilan Agama se-Sumatera Barat pada Tahun 2025 sebesar 731 orang. Untuk jabatan teknis perlu adanya penambahan hakim, pejabat kepaniteraan, dan kejurusitaan, sebab ada beberapa pengadilan agama di Sumatera Barat yang masih kekurangan jabatan teknis tersebut yang berakibat lambatnya penyelesaian perkara. Sementara itu untuk jabatan non teknis perlu dilakukan penambahan SDM sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang, untuk DIPA 01 terealisasi sebesar Rp.107.584.123.000 atau 99,02% dari total Pagu Rp.106,530,193,613 sisa merupakan benefit efisiensi untuk negara. Sedangkan DIPA 04 terealisasi sebesar Rp.2.738.668.140 atau 98,51% dari total pagu Rp.2.780.028.000.



# KESIMPULAN

- Pada Tahun 2025 di bidang reformasi birokrasi, terdapat 2 satker yang masuk ke tahap akhir Desk Evaluation – Wawancara Zona Integritas menuju WBK di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang, yakni PA Payakumbuh dan PA Lubuk Basung. Sebelumnya, pada tahun 2021 PTA Padang berhasil mengukir prestasi dengan meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 20 Desember 2021. Secara keseluruhan terdapat 5 satker di wilayah PTA Padang yang telah meraih WBK, yakni PTA Padang, PA Sawahlunto, PA Solok, PA Batusangkar, dan PA Padang Panjang
- Peningkatan pelayanan PTA Padang dengan motto Rancak Bana telah mengantarkan PTA Padang meraih TOP digital award Tahun 2024 dan Top digital implementation Star bintang 4, serta pimpinan PTA Padang meraih TOP leader on digital implementation 2024 sebagai pimpinan yang memiliki peran dan komitmen dalam pemnafaatn teknologi digital
- Kemudian mendapatkan anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024, dengan 2 penghargaan yaitu Peringkat 1 Keterbukaan Informasi Publik Kategori Instansi Vertikal dan meraih predikat informatif kategori instansi vertikal.

# REKOMENDASI



1. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan pengadilan, agar Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama di wilayahnya diberi penambahan pegawai sesuai dengan semakin beratnya beban tugas Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang serta perlunya peningkatan kualitas Hakim dan ASN dalam penggunaan teknologi informasi melalui bimtek/pelatihan teknis Untuk meningkatkan kompetensi hakim perlu diadakan bimbingan teknis yustisial.
2. Usulan pendirian Pengadilan Agama baru di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang, yaitu Pengadilan Agama Padang Pariaman.
3. Untuk kelancaran pelaksanaan peningkatan pelayanan publik kepada pencari keadilan diperlukan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendukungnya, dan juga pemenuhan penggunaan teknologi informasi dalam rangka modernisasi pengadilan berkelanjutan juga sangat dibutuhkan sarana dan prasarana penunjangnya seperti pengadaan server dan pembaruan jaringan, dan penambahan daya seluruh Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang.
4. Dalam meningkatkan pelayanan yang prima perlu pengadilan agama yang prototype, maka diharapkan Mahkamah Agung memprioritaskan 5 (lima) Pengadilan Agama yang belum prototype yakni PA Painan, PA Muara Labuh, PA Padang Panjang, PA Sijunjung, dan PA Talu.



# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

## Pengadilan Tinggi Agama Padang

Jl. By Pass KM. 24  
Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah  
Padang - Sumatera Barat, Indonesia 25171  
(0751) 7054806  
admin@pta-padang.go.id



@ptapadanggoid



PengadilanTinggiAgamaPadang



PengadilanTinggiAgamaPadang



www.pta-padang.go.id



## PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG  
NOMOR: 0196/KPTA.W3-A/OT1.6/I/2026

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025 PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

**Menimbang :** a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun;  
b. bahwa Pejabat/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
3. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;  
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan);  
5. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16516/SEK/OT1.6/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Tahun 2025.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2025;

**KESATU :** Menunjuk Pejabat/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebut namanya pada daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025;

**KEDUA :** Tim bertugas menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2025 dengan berpedoman kepada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16516/SEK/OT1.6/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Tahun 2025.

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 06 Januari 2025  
KETUA PENGADILAN TINGGI  
AGAMA PADANG,



Drs. Nur Khazim, M.H.  
NIP. 196008031991031002

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG  
NOMOR: 0196/KPTA.W3-A/OT1.6/I/2026  
TANGGAL: 06 JANUARI 2026**

**TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Pembina	:	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
Pengarah	:	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
Ketua	:	Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang
Wakil Ketua	:	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang
Koordinator BAB I dan BAB VII	:	Elvi Yunita, S.H, M.H.
Anggota	:	1. Riccelia Junifa, S.E. 2. Nella Agustri, S.E. 3. Hutri Yengky, S.M. 4. Dirga Irawan
Koordinator BAB II dan BAB V	:	Masdi S.H.
Anggota	:	1. Riswan, S.H. 2. Nora Oktavia, S.H. 3. Aidil Akbar, S.E. 4. Abraham Ismed, S.H, M.H. 5. Aldo Abd. Latif Karim, S.H. 6. Rinaldi Orlando, A.Md, A.B. 7. Muhammad Rajab, S.H.
Koordinator BAB III	:	Mukhlis, S.H.
Anggota	:	1. Berki Rahmat, S.Kom. 2. Mursyidah, S.AP. 3. Arya Jaya Shentika, S.H. 4. Nia Sesfiani, S.T.
Koordinator BAB IV	:	Ismail, S.H.I, M.A.
Anggota	:	1. Millia Sufia, S.E, S.H, M.M. 2. Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H. 3. Elsa Rusdiana, S.E. 4. Uswatunnisa Hasanah, S.Psi., M.Psi., Psikolog 5. Yova Nelindy, A.Md. 6. Richa Meilyana Rachmawati, A.Md. 7. Imam Anugerah, A.Md. 8. Ferdina Okta Fenny, S.T. 9. Zamharir Shaleh, A.Md. Kom.

Koordinator BAB VI

: Dra. Syuryati

Anggota

1. Ade Armawi Paypas, S.Kom
2. Fitria Irma Ramadhani Lubis, A.Md, A.B.
3. Nurfadhillah, S.IP.

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PADANG,



Drs. Nur Khazim, M.H.  
NIP. 196008031991031002